

**Laporan Penelitian Kluster
Penelitian Dasar Interdisipliner**



**INKLUSIVITAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS/PDBK
(Studi Multi Situs di Panti Asuhan Aisyah dan Sekolah Dasar
Nasional Immersion Primary School Ponorogo)**

Oleh:

- 1. Dr. Umar Sidiq, M.Ag/Ketua Peneliti**
NIP. 197606172008011012
- 2. Dr. Athok Fu'adi, M.Pd/Anggota**
NIP. 197611062006041004
- 3. Yenny Ika Fatmasari/Anggota**
NIM. 502190046
- 4. Aulia Nuha Afifatul Istiqomah/Anggota**
NIM. 502190055

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2020**

PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Inklusivitas Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/PDBK (Studi Multi Situs di Panti Asuhan Aisyah dan Sekolah Dasar Nasional Immersion Primary School Ponorogo)**

Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif

Pendekatan Penelitian : Kualitatif

Bidang Kajian : Pendidikan

Ketua Peneliti : Dr. Umar Sidiq, M.Ag.

Anggota : 1. Athok Fu'adi, M.Pd.
2. Yenny Ika Fatmasari
3. Aulia Nuha Afifatul Istiqomah

Jangka Waktu : 6 (Enam) Bulan

Biaya yang Diperlukan : Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah)

Sumber Dana : DIPA IAIN Ponorogo

Ponorogo, 14 Agustus 2020

Ketua Peneliti

Ketua LPRM IAIN Ponorogo



Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag

NIP. 19740909201122001

Dr. Umar Sidiq, M.Ag

NIP. 197606172008011012

Mengesahkan,
Rektor IAIN Ponorogo



Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

NIP. 195705061983032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya berhak disampaikan kepada Allah Swt. yang telah memberikan ridho dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: “Inklusifitas Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/PDBK (Studi Multisitus di Panti Asuhan ‘Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo).” Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimal, kesulitan dan keterbatasan yang menghambat proses penelitian ini dapat diatasi dengan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis hanya mampu berdo'a ke hadirat Allah, semoga bantuan dan partisipasi dari siapapun datangnya, mendapat tempat yang layak dan balasan yang berlipat ganda *jazakumullāh ahsan al-jazā'*.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sadar penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan harapan. Oleh sebab itu, koreksi, kritik, dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, teriring harapan semoga karya ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. *Amin yā rabba al- 'ālamîn*.

Ponorogo, 14 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK PENELITIAN

INKLUSIVITAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS/PDBK (Studi Multisitus di Panti Asuhan ‘Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo)

Ketua Tim : Dr. Umar Sidiq, M. Ag
Anggota : 1. Athok Fuadi, M.Pd
2. Yenny Ika Fatmasari
3. Aulia Nuha Afifatul Istiqomah

Sekolah *inklusif* merupakan sekolah regular yang mengakomodasi seluruh peserta didik dengan tanpa memperhatikan aspek fisik, intelektual, sosial emosional, bahasa, geografis, kondisi keluarga, ataupun kondisi yang lainnya. Dalam hal ini, sekolah juga menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, baik yang memiliki kelainan ataupun bakat istimewa yang mereka semua belajar dalam lingkungan dan tempat yang sama.

SD Immersion Ponorogo menggunakan beberapa cara yang dilakukan oleh sekolah terkait manajemen kurikulum modifikasi di sekolah tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah ada penulisan jurnal terkait pelaksanaan pembelajaran dalam *setting inklusif* baik yang dilakukan di kelas regular dan ruang Unit Stimulasi Anak/USA. Di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Ponorogo, anak-anak mendapatkan pembinaan khusus dari pengasuh panti asuhan termasuk anak tunanetra. Selain mendapatkan pembinaan mereka juga mendapatkan pembelajaran tambahan seperti di sekolah formal. (1) Bagaimanakah modifikasi kurikulum pendidikan inklusif di Panti Asuhan ‘Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo? (2)

Bagaimana implikasi modifikasi kurikulum pendidikan inklusif di Panti Asuhan “Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo?

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi data, *display* data, dan verifikasi. Pengecekan data dilakukan melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menggunakan tiga model kurikulum, yaitu kurikulum umum, kurikulum modifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan. Penggunaan ketiga model kurikulum dan perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam pada sekolah inklusif maka dibutuhkan sistem penilaian fleksibel yang dapat dipergunakan untuk menilai kompetensi belajar semua peserta didik. Keberagaman peserta didik memungkinkan untuk menyusun kurikulum yang berbeda dengan yang lainnya melalui proses adaptasi kurikulum dan penyusunan program pembelajaran individual. (2) Semua orang terlibat dalam tantangan mempersiapkan siswa penyandang hambatan untuk kehidupan di masyarakat yang lebih terbuka. Akhirnya pendidikan anak berkebutuhan khusus benar-benar dirancang secara individual dengan mempertimbangkan kebutuhan inklusif, kebutuhan layanan khusus, dan kebutuhan dukungan lingkungan yang menunjukkan dukungan penuh terhadap ABK diperlukan bagi keberhasilan pendidikannya.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus	13
2. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus.....	15
3. Pengertian Tunanetra.....	22
4. Karakteristik Anak Tunanetra	24
5. Hambatan Bagi Anak Tunanetra	29
6. Pengertian Pola Pembinaan	33
7. Aspek-aspek Pembinaan.....	34

8. Landasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ...	37
9. Pengertian Kurikulum	41
10. Komponen Kurikulum.....	43
11. Manajemen Kurikulum	50
12. Pendidikan Inklusif	66
13. Kurikulum Pendidikan Inklusif	95
14. Modifikasi Pendidikan Inklusif	108
15. Membentuk Sekolah Inklusif	122

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis dan Rancangan Penelitian	133
B. Lokasi Penelitian.....	134
C. Kehadiran Peneliti.....	134
D. Data dan Sumber Data	136
E. Teknik Pengumpulan Data	138
F. Teknik Analisis Data	142
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	148
H. Tahapan-tahapan Penelitian	153

DAFTAR RUJUKAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data statistik dari Pendidikan Khusus dan Divisi Manajemen Layanan Khusus (PPK-LK) pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa ada 330.764 Siswa Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Indonesia di tingkat sekolah dasar, 125.062 di antaranya dioperasikan di 1.823 Sekolah Khusus (SLB) melalui 34 provinsi . Sementara itu, dalam arti pendidikan komprehensif, ada 15.144 PDBK yang melayani di 811 sekolah standar, dan dapat dipahami bahwa setidaknya 190.558 PDBK masih tersisa untuk usia sekolah dasar yang belum menyediakan fasilitas pendidikan.

Berdasarkan hasil seperti itu, dapat ditemukan bahwa jika program-program PDBK hanya disediakan dalam bentuk Pendidikan Khusus (SLB), pemerintah akan mencakup hanya 37,8 persen dari keseluruhan PDBK Indonesia, atau 62,2 persen dari fasilitas PDBK tidak dapat kurang terlayani oleh sekolahnya. Sementara salah satu tuntutan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencatat bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus dapat mendidik kehidupan negara

dan Pasal 31 (1) mencatat bahwa "setiap orang memiliki hak atas pendidikan."¹

Kurangnya pendidikan pada usia sekolah dasar GDPK, terkait dengan adanya peraturan dan kewajiban pemerintah untuk dapat melayani pendidikan bagi semua warga negara, keberadaan layanan pendidikan *inklusif* yang diberikan melalui sekolah biasa dianggap sangat diperlukan dan Penting untuk dipertimbangkan sebagai alternatif utama dalam memberikan pendidikan khusus kepada siswa. Sekolah saat ini yang mengoperasikan sistem kurikulum universal dianggap sekolah terintegrasi. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* dalam makalah Sari Rudiwati termasuk Pendidikan di Indonesia menggambarkan sekolah komprehensif sebagai berikut:

*Inclusive education means that : "Schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups."*²

¹Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2004), 3.

² Sari Rudiwati, Potret Sekolah Inklusif di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Umum "Memilih Sekolah yang Tepat bagi

Sehingga dapat dimaknai bahwa sekolah *inklusif* merupakan sekolah standar yang mengakomodasi semua murid, terlepas dari kondisi fisik, mental, sosial, bahasa, geografis, keluarga atau lainnya. Sekolah sering mengenali anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam situasi ini, termasuk mereka yang memiliki kecacatan atau keterampilan unik dan mereka berdua belajar dalam suasana dan lokasi yang sama.³

Para peneliti memiliki banyak dasar untuk penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Immersion. Studi juga mengidentifikasi banyak aspek di mana pendidikan berkontribusi terhadap perubahan struktur kelas dalam pendidikan dari evaluasi di Sekolah Dasar Immersion Ponorogo. Di antara latihan yang dilakukan adalah penulisan laporan yang berkaitan dengan kemajuan pembelajaran di lingkungan yang komprehensif baik di ruang kelas normal dan di ruang Unit Stimulus Anak-Anak AS, akuisisi bersama GPK oleh 16 pendidik karena fakta bahwa belum terdapat lembaga

Anak Berkebutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) di Hotel INA Garuda Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2011.

³ Umar Sidiq, “Manajemen Modifikasi Kurikulum Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Di Sekolah Dasar National Immersion Primary School Ponorogo),” *Alhayat* 3, no. 2 (2018).

pendidikan dengan basis Luar Biasa yang berlokasi di Ponorogo. Luar Biasa / PLB, maka dari itu merupakan sebuah peluang bagi IAIN Ponorogo untuk mendirikan Fakultas Pendidikan Luar Biasa dengan hadirnya banyak struktur pendukung.

Inisiatif budaya multikultural yang dirancang di organisasi ini telah mendapatkan umpan balik yang kuat dari orang tua, pendidik, dan Dinas Pendidikan dari yang disebutkan di atas. Iklim sekolah terbuka diharapkan perlahan membaik bagi warga dan Dinas Pendidikan Kabupaten, dengan pemahaman yang kurang tentang nilai literasi setiap orang (*education to everyone*). Untuk lebih memusatkan perhatian pada pertumbuhan pendidikan berkualitas di Kabupaten Ponorogo ke depan, seperti di kota-kota lain, biaya pendidikan untuk PDBK menjadi tanggung jawab otoritas pendidikan dan negara.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Indonesia No 20/2003: "Warga negara dengan keterbatasan fisik, fisiologis, perilaku, akademik dan / atau sosial memiliki hak untuk pendidikan khusus".⁴ Jadi jelas bahwa sekolah di negara kita tidak menerima ketidaksetaraan,

⁴Depdiknas, *Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003* (Bandung: Citra Umbara, 2003), 8.

semua lapisan masyarakat dari segala komunitas memiliki hak atas pendidikan dan tidak ada perbedaan bahkan untuk anak-anak yang memiliki cacat fisik dan emosional yang dapat menghambat pendidikan mereka.⁵

Bimbingan keluarga untuk anak-anak, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu dll), kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan karena kurangnya pengetahuan, sehingga orang tua mereka membutuhkan bantuan dari lembaga pendidikan khusus untuk membantu anak-anak mereka memberikan bimbingan.

Pendidikan diterima tidak hanya dari perguruan tinggi atau sekolah formal, tetapi juga melalui sekolah non-formal, khususnya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan umpan balik yang tidak diperoleh dari perguruan tinggi atau formal. Lain halnya yang terjadi di Panti Asuhan Aisyah Ponorogo, di mana anak-anak ini mendapatkan dukungan ekstra dari pengasuh panti asuhan dan anak-anak tunanetra lainnya. Mereka juga mendapatkan instruksi tambahan serta latihan, seperti di sekolah-sekolah terstruktur.

⁵ Umar Sidiq, "Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen," *Edukasi* 3, no. 2 (2015): 977–90.

Peneliti mengambil judul penelitian "Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus / PDBK (Studi Multisitus di *Panti Asuhan Aisyiah* dan *Sekolah Dasar Immersion Nasional Ponorogo*)" dari latar belakang seperti yang dijelaskan.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks masalah di atas, dan juga membatasi dan mendorong studi hasil, peneliti akan merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modifikasi kurikulum pendidikan inklusif di Panti Asuhan 'Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo?
2. Bagaimana implikasi modifikasi kurikulum pendidikan inklusif di Panti Asuhan 'Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menemukan:

1. Modifikasi kurikulum pendidikan inklusif di Panti Asuhan ‘Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo.
2. Implikasi modifikasi kurikulum pendidikan inklusif di Panti Asuhan ‘Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Tinjauan Umum, yang melibatkan tinjauan regional tentang masalah-masalah yang dibahas, dan terdiri dari konteks masalah, deskripsi pertanyaan, prioritas penelitian, dan diskusi terstruktur.

Bab II Telaah hasil penelitian sebelumnya dan studi teoritis untuk menjelaskan kerangka acuan teoretis yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian dan pemikiran.

Bab III Metode penelitian yang melibatkan metodologi, bentuk penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas h, tahapan analisis.

Bab IV Temuan data umum maupun data khusus di lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan.

Bab VI Penutup, dalam bagian ini, penulis menyertakan interpretasi terperinci dari penjelasan saat ini dan saran untuk

8

ditingkatkan yang tidak ada hubungannya dengan penulisan penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

SLTPLB Aisyiyah Ponorogo Tahun Akademik 2004/2005: Bima Krisbiantoro, Penggunaan Sistem Pembelajaran Braille untuk membaca dan menulis bahasa Arab untuk siswa tunanetra.⁶ Dalam laporan ini, faktor pendorong dan menghambat dalam penggunaan sistem Braille dalam belajar membaca dan menulis bahasa Arab pada siswa tunanetra di SLTPLB Aisyiyah Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah cukup berhasil menerapkan metode Braille di lapangan, walaupun masih ada kendala yang belum dapat diatasi secara maksimal.

Priyadi, Studi Pendidikan Agama Islam, tahun akademik 2003/2004 di Panca Bhakti Magetan SLTPLB.⁷ Yang dibahas dalam analisis ini adalah metode yang digunakan oleh siswa di Panca Bhakti Magetan SLTPLB untuk belajar Pendidikan Agama Islam. Panca Bhakti Magetan SLTPLB

⁶Bima Krisbiantoro, *Aplikasi Metode Braille dalam Pembelajaran Membaca dan Menulis Arab pada Siswa Tunanetra di SLTPLB Aisyiyah Ponorogo*, Jurusan Tarbiyah, STAIN Ponorogo, 2005.

⁷Priyadi, *Metode Pembelajaran Agama Islam di SLTPLB Panca Bhakti Magetan*, Jurusan Tarbiyah, STAIN Ponorogo, 2004.

adalah organisasi pendidikan terstruktur yang menumbuhkan anak-anak cacat, termasuk tunanetra, tunarungu, dan keterbelakangan mental dengan metode pembelajaran khusus dalam Pendidikan Agama Islam dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Menjadi seorang instruktur Pendidikan Islam harus memiliki pengetahuan dan harus menggunakan pendekatan terbaik untuk mendapatkan kinerja yang optimal.

Ketiga, Kajian yang dilakukan oleh Sari Rudiwati, Dosen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Potret Sekolah Inklusif di Indonesia” (Makalah dalam Seminar Umum 'Memilih Sekolah Terbaik untuk Anak-Anak dengan Kebutuhan Khusus' di Pertemuan Nasional Asosiasi untuk Kesehatan Perilaku dan Remaja (AKESWARI). Karya ini menyoroti sifat dari sekolah *inklusif* dalam menempatkan anak-anak penyandang disabilitas akan dididik secara lebih terbuka di antara program-program alternatif yang tersedia dan berfokus pada kapasitas dan bentuk dan tingkat kecacatan. Penempatan ini berpotensi disesuaikan untuk beralih dari satu opsi alternatif ke opsi lain, sehingga tingkat kebutuhan yang bervariasi tersebut dapat terdidik semua dengan tawaran berbagai program pelengkap khusus untuk kebutuhan dan keterampilan mereka. Pekerjaan ini berfokus pada bidang memperkenalkan sekolah *inklusif* di Indonesia,

sedangkan penelitian ini bertujuan menangani kurikulum *inklusif* untuk penyesuaian pendidikan dalam dua organisasi berbeda.

Keempat, Sebuah studi yang dilakukan oleh Sunardi dan Sunaryo, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Impelementasinya)”. Karya ini menunjukkan bahwa pendidikan *inklusif* adalah pendidikan praktis dan kreatif dalam memperluas eksposur dan meningkatkan standar pendidikan untuk semua orang tanpa paksaan, dan itu menarik dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang lebih luas. Pada tahap organisasi, sementara bersifat universal, masih ada banyak tantangan dan hambatan, termasuk kesalahan dalam tindakan. Akibatnya, jalan menuju sekolah yang adil (termasuk sekolah) mencakup kontrol yang cermat terhadap pendidikan *inklusif*, memastikan bahwa strategi dan pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip inti. Kaitan antara pekerjaan ini dan studi yang saat ini dilakukan oleh para akademisi terletak pada manajemen pendidikan *inklusif*. Perbedaannya terletak pada definisi, strategi, dan pelaksanaan lembaga pendidikan *inklusif* yang sifatnya luas, sedangkan penelitian yang penulis teliti di dua lembaga pendidikan inklusif hanya di bidang perubahan kurikulum pendidikan inklusif.

Kelima, penelitian yang dilakukan di Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia oleh Titik Handayani dan Angga Sisca Rahadian, “Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rincian berbagai undang-undang, peraturan kebijakan, dan peraturan menteri tidak dapat mendukung gagasan pendidikan universal sebagai alternatif untuk sektor pertumbuhan pendidikan Indonesia. Hukum-hukum pada tahap aplikasi secara global menjadi “diskriminasi” terhadap siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk kekurangan fasilitas, kurangnya staf, kurikulum yang ketat, dan kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Dalam situasi ini, Indonesia perlu mengubah kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan komprehensif di masa depan. Pendidikan inklusif akan dicapai dalam fase yang berkembang, dengan hambatan terbesar adalah peningkatan keterlibatan, konsistensi, dan keahlian personel instruksional yang mampu beradaptasi dengan beragam kebutuhan peserta didik. Pekerjaan ini jelas berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh para sarjana, karena penelitian ini terkait dengan hukum dan peraturan Indonesia dan pengenalan pendidikan inklusif. Meskipun pekerjaan yang akan dilakukan oleh peneliti didasarkan pada penanganan penyesuaian program komprehensif dalam pendidikan di dua

organisasi. Relevansi studi ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh akademisi berada di bidang aplikasi pendidikan komprehensif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Kata yang digunakan untuk diterapkan pada anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) secara tradisional telah dimodifikasi berkali-kali sesuai dengan definisi yang diasumsikan saat ini. Peningkatan terminologi mulai dari anak perempuan, anak-anak cacat, anak-anak tuna, anak-anak luar biasa atau anak-anak berkelainan hingga istilah anak-anak berkebutuhan khusus.⁸

Pemahaman anak dengan kebutuhan khusus adalah mereka yang terus menerima perawatan sosial khusus, baik permanen dan sementara, yang disebabkan oleh:⁹

- a. Kondisi sosial-emosi, dan/atau
- b. Kondisi ekonomi, dan/atau
- c. Kondisi politik, dan/atau

⁸ Hidayat, et al., *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: UPI Press, 2006), 121.

⁹ Ibid., 2.

d. Kelainan bawaan maupun yang didapat kemudian

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan ciri khusus yang berbeda dari anak pada umumnya dan tidak ditemukan gangguan intelektual, emosional, atau fisik pada anak berkebutuhan khusus (tunanetra, gangguan pendengaran, keterbelakangan mental, gangguan fisik, gangguan mental, kesulitan belajar, gangguan perilaku). Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.¹⁰

Ada dua kelompok anak berkebutuhan khusus (ABK), yaitu: *transient* (sementara) dan permanen (seumur hidup). Adapun kelompok ABK sementara, termasuk: anak-anak di strata sosial ekonomi rendah, anak jalanan (anjal), anak-anak yang didera bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, dan anak-anak yang merupakan pasien HIV-AIDS. Sedangkan dalam kelompok ABK permanen termasuk bayi dengan kehilangan penglihatan, cacat pendengaran, keterbelakangan intelektual, defisiensi fisik, kehilangan, skizofrenia, ADHD (*Attention Deficiency and Hiperactivity Disorders*), remaja dengan

¹⁰ Anak_berkebutuhan_khusus, <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

kecacatan kognitif, anak berbakat dan sangat cerdas (*gifted*), dan lain-lain.¹¹

2. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami perbedaan dari anak-anak pada umumnya, baik dari segi intelektual, fisik, emosional atau campuran dari aspek-aspek tersebut, dan program pendidikan khusus diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan mereka seoptimal mungkin.¹²

Meskipun anak berkebutuhan khusus itu cukup berdiferensiasi namun pada dasarnya mereka juga memiliki karakteristik yang relatif sama, di antaranya dalam hal:¹³

Walaupun anak-anak tersebut sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya, umumnya mereka semua memiliki karakteristik yang hampir sama, termasuk:

¹¹Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus, <http://blog.uin-malang.ac.id/ansur/2011/06/14/strategi-pembelajaran-bagi-anak-berkebutuhan-khusus/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

¹² Hidayat, et al., *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, 122.

¹³ Ibid.

- a. Rata-rata semua kelompok anak-anak dengan kebutuhan khusus tertunda dalam hal pertumbuhan akademis dan yang lainnya sangat terlambat. Ini tergantung pada tingkat keparahan gangguan dan tingkat pengetahuan yang didapatnya.
- b. Selain itu, mereka memiliki masalah yang berkaitan dengan lingkungan mereka dalam hal sosialisasi, tetapi mereka merasakan kenyamanan di balik itu menanggapi anak-anak lain dengan kebutuhan khusus dengan kondisi yang sama. Penyesuaian masalah dapat dikaitkan dengan inferioritas yang disebabkan oleh kelainan atau kekurangan kapasitas mereka untuk menyesuaikan diri.
- c. Dalam hal kesehatan mental, perasaan biasanya cenderung kurang aman, mudah teralihkan, merasa dihina, konflik diri dll. Ini diasumsikan karena keterbatasan gerak, intuisi dan pengendalian diri.
- d. Sementara dalam segi komunikasi sering menimbulkan kesulitan atau gangguan, terutama bagi mereka yang memiliki kecacatan sangat serius, dengan dibantu dengan keterampilan lain, misalnya; mereka yang mengalami cacat visual

dapat diatasi dengan mendengarkan atau kontak, penglihatan dan sebagainya dapat mengatasi gangguan pendengaran.

Tidak ada salahnya menyediakan konten khusus, terutama untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, sebagai instruktur selalu memperhatikan konsep-konsep tertentu, termasuk yang berikut:¹⁴

- a. *Prinsip kasih sayang*. Pada dasarnya, konsep kasih sayang adalah merangkul mereka dengan apa adanya, dan bercita-cita untuk membuat mereka menjalani kehidupan mereka dengan tepat, seperti anak biasa pada umumnya. Oleh karena itu pengorbanan harus diberikan kepada mereka: (a) tidak memanjakan, (b) tidak peka terhadap keinginan mereka, dan (c) melakukan tugas yang sesuai dengan kemampuan bayi.
- b. *Prinsip layanan individual*. Program individual perlu memiliki porsi yang lebih besar untuk mengajar anak-anak penyandang cacat, karena setiap individu berbeda dalam bentuk dan tingkat daripada satu sama lain. Oleh karena itu, upaya

¹⁴ Muhammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, 24-26.

perlu dilakukan untuk mereka selama pendidikan mereka: (a) jumlah siswa yang dilayani oleh guru di setiap kelas tidak lebih dari 4-6 orang, (b) pengaturan kurikulum dan jadwal pelajaran bisa fleksibel, (c) penataan kelas perlu dirancang agar guru dapat dengan mudah menjangkau semua siswa, dan (d) modifikasi bantuan pembelajaran.

- c. *Prinsip kesiapan.* Kesiapan diperlukan agar pelajaran seperti itu bisa diperoleh. Terutama kesiapan anak untuk mengikuti perkuliahan, termasuk kesadaran prasyarat. Misalnya, anak-anak cacat mental sebelum diajarkan pelajaran menjahit perlu diajarkan cara menusuk jarum. Contoh lain dari anak-anak penyandang cacat pada umumnya memiliki kecenderungan cepat bosan dan capek menangkap materi. Oleh karena itu, guru dalam situasi ini tidak perlu memberikan pelajaran baru, tetapi diberikan acara yang menyenangkan dan merangsang, instruktur akan terus mendapat pelajaran setelah penyegaran.
- d. *Prinsip keperagaan.* Penggunaan alat bantu pendidikan sebagai alat bantu sangat mendorong perkembangan efisien anak-anak penyandang

cacat. Selain memudahkan guru untuk mengajar, tujuan lain menggunakan alat peraga sebagai alat pengajaran untuk anak-anak autis adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konten yang diberikan guru. Alat bantu grafis yang digunakan oleh penyiaran akan dimaksudkan untuk memasukkan entitas atau keadaan yang sebenarnya, meskipun orang dapat menggunakan item yang salah atau minimal ilustrasi karena menjadi tidak mungkin untuk melakukannya. Sebagai permulaan, membawa gaya hewan untuk anak-anak tuli dengan meminta anak-anak untuk menempatkan gambar mereka di panel daripada hanya mengatakan cerita sebelum pelajaran. Tokoh belimbing termasuk anak-anak yang cacat visual, dan yang terbaik adalah memiliki item awal daripada imitasi, karena mereka dapat mengingat bentuk dan skala selain wajah, mereka juga dapat mengingat rasanya.

- e. *Prinsip motivasi*. Prinsip motivasi ini lebih fokus pada pelatihan dan memberikan tes yang disesuaikan dengan situasi anak-anak penyandang cacat. Misalnya untuk anak-anak tunanetra, apakah mereka diundang belajar ke kebun binatang,

orientasi belajar dan aksesibilitas berdasarkan pemahaman ekspresi hewan akan lebih menarik dan menyenangkan. Bagi anak-anak cacat mental untuk menggambarkan empat seimbang lima item ideal, akan lebih bermanfaat jika konten asli dilihat dan benar-benar ditawarkan kepada anak-anak untuk dikonsumsi daripada hanya dalam bentuk foto.

- f. *Prinsip belajar dan bekerja kelompok.* Cara tersebut harus mempromosikan gagasan belajar dan berfungsi di masyarakat sebagai salah satu dasar untuk mengajar anak-anak autis sehingga sebagai perwakilan dari masyarakat mereka dapat bergerak bersama dengan atmosfer yang lebih luas tanpa merasa tidak setara dengan warga negara lainnya. Jadi aspek egosentris atau serakah dari anak-anak tuli harus dikurangi atau dihilangkan oleh sekolah dan kelompok masyarakat karena mereka tidak menghadapi emosi, kekerasan, dan gangguan pada anak-anak penyandang cacat. Melalui pengalaman-pengalaman ini mereka diharapkan mampu memahami secara penuh dan secara naluriah bagaimana bergaul dengan orang lain.

- g. *Prinsip keterampilan.* Selain bekerja secara sistematis, edukatif, terapeutik dan rehabilitasi, instruksi kompetensi yang diberikan kepada anak penyandang cacat mungkin sering dilihat sebagai pedoman dalam kehidupan orang dewasa. Selektif memastikan bahwa anak penyandang cacat dipandu dengan benar terhadap keinginan, kekuatan, kemampuan, dan emosi. Pendidikan melibatkan mengarahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk berpikir kritis, merasa rentan dan dapat bekerja. Rekreasi memastikan aspek operasi yang ditampilkan cukup menyenangkan bagi anak autis. Jadi ini memastikan bahwa keahlian yang ditawarkan harus menjadi sumber pembebasan terlepas dari keterbatasan atau keterbatasan yang mereka tanggung
- h. *Prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap.* Perilaku anak-anak penyandang cacat pada umumnya tidak normal secara fisik dan mental serta harus diketahui bahwa mereka memiliki sisi positif dan belum tentu menjadi perhatian orang lain. Sebagai permulaan, anak-anak tunanetra yang

sering memalingkan kepala dari satu sisi ke sisi lain atau secara tidak sengaja menggerakkan tubuh mereka atau anak-anak tuli tampaknya menyalahkan orang lain karena kegagalan mereka menangkap interaksi dengan orang lain.

3. Pengertian Tunanetra

Mata adalah salah satu dari lima indera yang benar-benar relevan bagi seseorang, mata sebagai indra penglihatan dalam tubuh manusia terdaftar di urutan indra utama, karena ia mendukung seseorang dalam langkah aktivitas kesehariannya. Dengan demikian penglihatan seseorang yang terganggu menyiratkan bahwa ia telah kehilangan perannya dalam kapasitas visualnya menangkap artefak dan semua jenis kegiatan di atmosfernya.

Istilah tunanetra sudah biasa bagi kita, tetapi banyak orang masih belum mengerti. Meskipun dari segi bahasa persepsi tunanetra adalah terdiri dari kata tuna dan tuna netra. Tuna berarti rusak, luka, kurang, tidak memiliki, sedangkan netra artinya mata.¹⁵ Jadi

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 971.

tunanetra adalah kerusakan pada mata, cedera pada mata atau kehilangan mata yang menyiratkan kebutaan atau kurang penglihatan

Anak-anak dengan gangguan penglihatan lebih akrab disebut siswa tunanetra dalam pendidikan khusus. Memahami tunanetra tidak bisa hanya didefinisikan anak-anak yang buta saja, namun juga melibatkan mereka yang dapat melihat tetapi sangat terganggu dan tidak dapat digunakan untuk tujuan kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran, dan anak-anak yang penglihatan setengah, penglihatan rendah (*low vision*) adalah bagian dari kelompok tunanetra.

Oleh karena itu, definisi anak tunanetra dipahami sebagai anak tunanetra atau orang buta juga dapat dipandang sebagai individu yang salah satu indranya dalam hal ini yaitu penglihatan, tidak beroperasi sebagaimana orang pada kebanyakan.

4. Karakteristik Anak Tunanetra

Dalam keadaan berikut ini anak-anak dengan gangguan penglihatan atau anak-anak yang buta dapat ditandai:

- a. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang pada umumnya.
- b. Terjadinya kekeruhan pada lensa mata atau terdapatnya cairan tertentu.
- c. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
- d. Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

Dari kriteria tersebut yang biasa digunakan sebagai kriteria apakah seorang anak tuna atau tidak didasarkan pada tingkat ketajaman penglihatan. Prosedur yang dikenal sebagai ujian *snellen card* dapat digunakan untuk mengetahui kebutaan. Ini harus dicatat bahwa jika ketajaman penglihatan lebih buruk dari 6/21 bayi dianggap buta. Ini menunjukkan bahwa anak-anak hanya dapat menafsirkan huruf pada jarak 6 meter berdasarkan ujian, sedangkan individu yang waspada harus menerjemahkan pada jarak 21 meter

Perbandingan ini memungkinkan anak-anak tunanetra dibagi menjadi dua kategori, yaitu.:

a. Buta

Dikatakan tidak dapat melihat sama sekali jika anak benar-benar tidak dapat memperoleh input cahaya dari luar.

b. Penglihatan rendah

Jika anak masih bisa mendapatkan stimulasi cahaya dari luar tetapi ketajamannya mencapai 6/21, atau jika anak masih bisa membaca berita utama di koran.¹⁶

Karena kehilangan penglihatan dan kadang-kadang tidak adanya kemampuan untuk melihat sama sekali, anak-anak dengan gangguan sensorik memiliki kebiasaan dan karakteristik yang tidak biasa serta cacat fisik tertentu yang tidak ditunjukkan oleh orang pada umumnya, dan mereka biasanya tidak dapat tumbuh pada tingkat yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Dalam pendidikan seorang anak dianggap buta jika ia memiliki karakteristik yang berbeda dengan makna sebagai berikut:¹⁷

- a. Anak tunanetra tidak mengharapkan simpati dari orang lain, tetapi mengharapkan diperlukan

¹⁶ Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 65-66.

¹⁷ Hidayat, et al., *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, 123.

sebagaimana orang lain dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat mandiri di kemudian hari.

- b. Dia tidak mampu mengamati bagaimana orang lain melakukan sesuatu.
- c. Pada umumnya mempunyai kepribadian yang relatif berbeda dengan anak awas, misalnya merasa rendah diri, hidupnya tidak terarah dan tak bermakna, mudah mengalami frustrasi dan sebagainya.
- d. Pada umumnya memiliki perbedaan yang cukup tajam di dalam menanggapi dan mereaksi lingkungan.
- e. Pada umumnya memiliki ketergantungan yang berlebihan pada orang lain.
- f. Karena keterbatasannya dalam mereaksi rangsangan visual dia sering berprasangka atau curiga terhadap orang lain.
- g. Fungsi kognisinya kurang dapat berkembang sesuai dengan semestinya, karena informasi yang dapat diterima terbatas.
- h. Pada umumnya memiliki perasaan mudah tersinggung, karena di samping terbatasnya

menerima rangsangan visual juga indera lainnya kurang baik peranannya.

- i. Pada umumnya memiliki kondisi fisik yang kurang seimbang, sehingga dalam gerakanya kurang leluasa.
- j. Kemampuan orientasi ruang dan mobilitas sangat terbatas.
- k. Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam motivasi untuk sukses dengan anak normal.

Namun untuk memahami secara mendalam bahwa bayi memiliki gangguan penglihatan, fitur wajah, tindakan dan keluhan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Ciri fisik, seperti mata juling, menyipit, kelopak mata bengkak, radang mata, gerakan mata abnormal.
- b. Ciri perilaku, seperti membaca dengan sangat cepat, membaca angka terlewatkan, semakin mengantuk saat membaca / menulis, terkadang memalingkan kepala saat Anda belajar, menyipitkan mata saat melirik papan tulis, kadang-kadang menggaruk mata, menatap ke atas saat memandang sesuatu dari kejauhan, cenderung

dalam melihat untuk memiringkan kepala, berjalan sering menabrak benda di depannya, salah menyalin dalam jarak dekat, dll.

- c. Ciri keluhan, seperti mengalami demam, kesulitan melihat dengan jelas dari kejauhan, fokus menjadi buram saat membaca atau menulis, hal-hal tampak seperti dua bagian, mata kadang terasa gatal.¹⁸

Sedangkan berdasarkan waktu terjadinya anak tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Tunanetra sejak lahir; yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat sejak kecil.
- b. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; mereka telah memiliki kesan-kesan atau pernah memiliki penglihatan tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
- c. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja; mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.

¹⁸ Munawir Yusuf dkk., *Pendidikan bagi Anak dengan Problema Belajar* (Solo: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 25.

- d. Tunanetra pada usia dewasa; pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
- e. Tunanetra dalam usia lanjut; sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.¹⁹

Secara etimologis, penyebab endogen dan eksogen memengaruhi penampilan cacat penglihatan. Ketunanetraan dikaitkan dengan penyebab endogen seperti keturunan atau alasan eksogen seperti cedera, obat-obatan dan lain-lain.²⁰

5. Hambatan Bagi Anak Tunanetra

Anak tunanetra umumnya tidak memiliki gangguan belajar, mereka sama dengan anak-anak pada umumnya. Karena ternyata, berdasarkan temuan review, bahwa anak-anak tunanetra memiliki kecerdasan rata-rata dan mereka tidak memiliki kekurangan kognitif, mereka hanya menghadapi kesulitan dalam satu aspek karena kondisi mereka

¹⁹Ciri-Ciri Anak Tuna Netra, <http://dapah.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none-4795.html>, diakses pada tanggal 20 April 2020.

²⁰ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, 34.

dalam pertumbuhan mereka. Hal-hal yang berkaitan dengan relaksasi mata ditambahkan sebagai kompensasi oleh indera tertentu.²¹ Tantangan terbesar yang dihadapi anak penyandang cacat penglihatan adalah hilangnya kendali indera penglihatan.

Dengan indera penglihatan seseorang akan melihat lingkungan di sekitarnya tidak hanya dalam bentuknya (dalam objek tiga dimensi), warna, dan dinamika. Seringkali oleh indera inilah sensasi sensoris tertentu diperoleh dan kemudian ditransfer ke otak untuk menimbulkan beberapa pengalaman atau interpretasi dan pemahaman sensasi seperti itu, yang pada dasarnya akan mempromosikan pertumbuhan dan kemajuan kognitif seseorang sehingga mereka dapat berkembang secara optimal.²²

Dengan demikian, terganggunya indera penglihatan mempengaruhi indera penglihatan seseorang dapat mengganggu kapasitas seseorang untuk berkomunikasi dengan atmosfer eksternal dan akan sedikit terhalang dalam menerima rangsangan kesadaran bahwa indera penglihatan akan diperoleh.

²¹ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 60.

²² Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 54.

Adapun anak tunanetra, dengan kegagalan satu atau lebih fitur penglihatan, kapasitas untuk memanfaatkan keterampilan fisik tertentu, seperti peningkatan proses neurologis dan transisi sosial, dapat memiliki efek yang merugikan pada keterampilan tersebut.²³

Anak-anak dengan cacat visual parsial biasanya akan sering menggunakan sisa-sisa penglihatan mereka bahkan jika mereka mengalami kesulitan menggunakan indera penglihatan, terutama saat membaca huruf-huruf ukuran di bawah standar. Sementara anak-anak yang sepenuhnya buta adalah mereka yang mengenal orang, benda, atau lingkungannya dengan menggunakan keterampilan taktil atau sensorik, indera pendengaran mereka, dan indra penciuman mereka.²⁴

Pada dasarnya seorang anak dengan disabilitas visual dapat memengaruhi perkembangannya baik sebagian atau sepenuhnya, seperti: pertumbuhan kognitif, kemajuan akademik, orientasi perilaku dan kemandirian, serta perkembangan sosial dan emosional.

²³ M. Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkekelainan*, 37.

²⁴ Bandhi Delphi, *Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2009), 225.

Hal ini mengakibatkan anak-anak tunanetra sering menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial di lingkungan mereka. Itu karena anak tunanetra tidak mungkin mengembangkan persyaratan-persyaratan normatif yang dituntut dari lingkungannya, seperti kebutuhan untuk belajar dan bersosialisasi, cara berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka, cara menunjukkan rasa terima kasih, minat timbal balik, cara menyampaikan diri, cara tersenyum, dll. Anak-anak tunanetra juga membutuhkan sumber daya sosial, pengajaran, persiapan dan insentif sosial serta keterampilan khusus untuk anak-anak tunanetra agar masalah ini tidak bertambah sehingga dapat bersaing dengan pertumbuhan anak-anak tunanetra.

6. Pengertian Pola Pembinaan

Istilah "pola" digambarkan sebagai model dasar kerja, ilustrasi, pedoman (desain).²⁵ Di mana istilah "pembinaan" ditandai sebagai organisasi, operasi, dan praktik yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan hasil yang lebih baik.²⁶ Kata pembinaan atau *coaching* mengacu pada praktik yang melestarikan dan menyempurnakan yang sudah mapan.²⁷ Mempertimbangkan pertumbuhan psikologis dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan dan membawa keadaan yang akan ada atau melestarikan keadaan tersebut.²⁸

Jadi model pembinaan harus dipandang sebagai strategi yang strategis, perilaku dilakukan dengan cara yang optimal dan sukses untuk menghasilkan hasil positif sesuai dengan tujuan dan prioritas.

²⁵Hendro Darmawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010), 89.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 37.

²⁷ Hedyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 43.

²⁸Pengertian Pembinaan, <http://www.masbied.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-psikologi/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

7. Aspek Pelatihan

Pertumbuhan anak mungkin diawali pada masa kecil, seorang anak perlu mendapatkan pendidikan langsung sedini mungkin. Seperti dalam Islam, penyemaian definisi agama tentang anak dimulai dari berada di dalam rahim ibu, kemudian setelah anak lahir dan pertumbuhan fisiknya yang dipercepat harus diikuti oleh penyebaran iman, nilai-nilai dan kecerdasan anak oleh keluarga.

Melalui kerangka pendidikan Islam prinsip-prinsip pertumbuhan anak akan dimasukkan secara terus menerus. Islam berupaya mengembangkan karakter siswa agar pandai mengatasi tantangan dalam kehidupan dengan penuh kasih sayang dan berpengetahuan luas dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.²⁹ Juga dalam hal ini, Zuhairini menetapkan tujuan pendidikan Islam yang meliputi:

- a. Pembinaan kepribadian (formal), dengan kata lain perilaku, pemikiran kritis, objektivitas, komitmen nasional dan politik, pengetahuan standar sosial dan agama,

²⁹ Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 147.

- b. Membina segi ilmu (materiil), termasuk kandungan empiris itu sendiri,
- c. Penciptaan dimensi keterampilan, prinsip realistik,
- d. Pertumbuhan yang sehat baik secara fisik maupun emosional.³⁰

Islam sebagai agama juga sangat terlibat dengan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Bimbingan Kitab Suci dan sunnah Nabi secara khusus mendesak pengikut Islam untuk meningkatkan keterampilan dan moralitas generasi muda dengan karakter yang mulia dan kemampuan yang baik, firman Allah dalam Surat al-Mujadalah ayat 11, yang berarti:

Islam sebagai agama sering sangat akrab dengan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Bimbingan Kitab Suci dan sunnah Nabi secara khusus menganjurkan pengikutnya untuk meningkatkan keterampilan dan moralitas generasi muda dengan karakter yang mulia dan kemampuan yang baik, Allah dalam Surat 11 ayat Al Mujadalah berfirman yang artinya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam

³⁰ Ibid., 149.

majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S al-Mujadalah:11).³¹

Jelas dari ayat di atas bahwa penciptaan warga Muslim tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dan teologi bersama. Sebagai Muslim, karena itu, juga meningkatkan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan sikap untuk mencapai rahmat Allah SWT

Tingkat gangguan dipengaruhi dalam kaitannya dengan pertumbuhan anak tunanetra. Lebih lanjut, dalam upaya untuk mengatasi bentuk kelainan ini, berbagai bentuk instruksi dan konseling diperlukan agar mereka dapat bersosialisasi dengan kelompok yang akan keluar, belajar, dan berfungsi dengan kepatuhan pada keterampilan dan hasil pelatihan yang diperoleh. Sebagai contoh, bidang keterampilan pijat, pembinaan dan mengembangkan ilmu sosial sebagai pengetahuan,

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 542.

dan untuk mendorong dan mengembangkan seni dan musik.³²

8. Landasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Ketentuan mengenai hak atas pendidikan bagi para penyandang cacat dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Kerangka Kerja Pendidikan Nasional. Bagian 32 mencatat bahwa: "Pendidikan Khusus (pendidikan luar biasa) adalah sekolah untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mengejar siklus akademik karena kekurangan fisik, kognitif, intelektual dan sosial. " Undang-undang No. 20 tahun 2003 membuat beberapa perlindungan penting bagi anak-anak penyandang cacat karena menawarkan dasar yang kuat bagi anak-anak penyandang cacat untuk memberikan kesempatan yang sama dengan semua anak biasa dalam hal sekolah dan mengajar.³³

Lebih jauh, ada tiga pilar yang mendasari perlunya anak-anak cacat untuk mendapat pendidikan lebih, yaitu:

³² Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar Edisi Revisi*, 68.

³³ Mohammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 1.

a. Landasan Religius

Setiap umat beragama berkewajiban untuk saling mendukung, terlepas dari iman, dan berbuat baik untuk sesama manusia. Tanggung jawab untuk mendukung dan berbuat baik kepada sesama manusia mencakup aspek-aspek dari jenis materi dan moral.³⁴ Individu dengan kebutuhan khusus adalah orang-orang yang mencari dukungan terlepas dari kecacatan mereka dan mereka membutuhkan bantuan dari orang lain.

Sebagaimana dalam al-Qur`an surat al-Ra`d ayat 11: *“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”* .(Q.S. al-Ra`d:11).³⁵ Demikian juga, karena anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak memiliki dukungan dan pengajaran, mereka hidup dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu umat beragama harus bersedia untuk mendapatkan dukungan, karena mereka memiliki kesempatan untuk mencari

³⁴ Sapariadi, *Mengapa Anak Berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).

³⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur`an dan Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 250.

pendidikan sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, komunitas dan diri mereka sendiri.

b. Landasan Yuridis

1) Dasar pendidikan nasional Indonesia ialah falsafah negara Pancasila dan UUD 1945, yakni :

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian pasal 31 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”

2) Undang-undang Pokok Pendidikan No. 12 Tahun 1954, yakni: Pasal 6 ayat (2): “Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khas untuk mereka yang membutuhkan”.³⁶

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Rencana Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Garis Besar Kebijakan Negara (GBHN)

³⁶ Ibid., 24.

menggarisbawahi bahwa anak-anak penyandang cacat memiliki hak atas fasilitas pendidikan. Disebutkan dalam UUSPN bahwa mereka memiliki hak atas pendidikan khusus.³⁷

c. Landasan Paedagogis

Telah diusulkan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah upaya bersama seumur hidup untuk meningkatkan kepribadian dan keterampilan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Prinsip ini membuat jelas bahwa sekolah pada dasarnya diperlukan atau dibutuhkan untuk semua orang, pada periode dan tempat yang tidak ditentukan.³⁸

Dalam situasi ini, program pendidikan khusus diperlukan karena adanya hambatan kondisi dan sebagainya untuk anak-anak penyandang cacat yang terlatih secara khusus, karena sekolah biasa tidak dapat menawarkan pendidikan yang memadai.

³⁷ Utami Munandar, *Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

³⁸ Sapariadi, et. al., *Mengapa Anak Berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan*, 25-26.

Melalui sudut pandang didaktik, diyakini bahwa ada potensi dan bakat yang sudah dapat dibangun pada anak-anak penyandang cacat, karena tidak ada potensi nol atau tidak ada sama sekali pada manusia. Mereka hanya membutuhkan layanan pendidikan khusus karena ketidakmampuan mereka untuk mengembangkan potensi pribadi mereka. Tampaknya di sini bahwa di samping kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki, aspek pendidikan memainkan peran penting dengan anak-anak penyandang cacat.

9. Pengertian Kurikulum

Program ini harus kreatif dan positif dalam mengejar ritme periode dalam arti pertumbuhan siklus pendidikan, untuk memiliki gaya hidup yang lebih bersemangat. Dalam sebuah program, Kilpatrick memberikan tiga nilai kunci itu:³⁹

- a. Dapat meningkatkan standar siswa di semua tahap sekolah.

³⁹ Kilpatrick, *Philosophy of Education from the Experimentalist Outlook* (New York: Harper and Row Boston, 1971).

- b. Harus membuat kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam satu kehidupan yang integral.
- c. Mengembangkan aspek kehidupan yang inovatif sebagai ujian pencapaian sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan pribadi mereka.

Jika ketiga cita-cita ini menghasilkan formulasi dalam pengajaran tentu akan menghasilkan individu yang sempurna. Tiga konsep program seperti itu umumnya disebut metode baru (program yang memungkinkan anak-anak untuk maju). Program ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh para pendidik untuk mengarahkan murid-murid mereka ke arah tujuan pendidikan yang ideal dengan memperoleh berbagai keahlian, kemampuan dan perilaku, serta menjadi holistik dan terperinci, memberikan kombinasi ilmu pengetahuan Alkitab dan umum untuk membuat entitas pleno.

Peran kurikulum sangat strategis dalam siklus pengajaran karena mencakup perumusan tentang prioritas yang menentukan di mana siswa harus dibimbing dan didorong, dan perumusan tentang bahan serta pengalaman belajar yang akan memberikan siswa

dengan informasi, kemampuan, sikap dan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam kehidupan masa depan.

10. Komponen Kurikulum

Suatu kurikulum harus konsisten, atau sesuai. Kesesuaian membutuhkan dua masalah, yang pertama adalah kesesuaian program dengan kebutuhan, keinginan, harapan dan pertumbuhan masyarakat. Selanjutnya, konsistensi dengan unsur-unsur program, termasuk materi sesuai dengan tujuan, metode sesuai dengan isi dan tujuan, serta penilaian sesuai dengan tujuan prosedur, informasi, dan tujuan kurikulum.⁴⁰

Dilihat dari uraian struktural kurikulum, ada empat komponen utama yaitu:

- a. Tujuan
- b. Isi dan struktur kurikulum
- c. Strategi pelaksanaan
- d. Komponen evaluasi

⁴⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 102.

Keempat elemen tersebut saling berhubungan sehingga membentuk satu struktur sebagai program pendidikan.⁴¹

a. Tujuan

Setiap satuan pendidikan harus berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Program Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berupaya membangun kapasitas siswa untuk menjadi orang-orang yang inovatif, mandiri dan kooperatif yang memiliki kepercayaan diri, berkomitmen taat kepada Allah SWT serta bertanggung jawab.⁴²

Pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada siswa, dan kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pembelajaran pertama-tama harus ditentukan, karena: (a) tujuannya adalah untuk menentukan arah

⁴¹ Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 51.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dan gaya kegiatan pendidikan, (b) tujuan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan, (c)) tujuan adalah pedoman dalam setiap upaya dan tindakan implementasi pendidikan.⁴³

b. Isi dan Struktur Kurikulum

Materi kurikulum mengacu pada informasi empiris dan peluang belajar yang harus ditawarkan kepada siswa untuk memenuhi tujuan pengajaran. Untuk menentukan kualitas program, penting untuk mengubah tingkat dan tingkat kemajuan dalam pendidikan yang ada dalam budaya, pertumbuhan dalam sains dan teknologi, sementara tidak terisolasi dari keadaan siswa (psikologi anak) di setiap tahap pendidikan.

c. Strategi Pembelajaran

Ketika mengembangkan suatu kurikulum, strategi pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan konten pembelajaran dalam upaya untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran melibatkan

⁴³ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: Teras, 2009).

pemahaman bagaimana tugas guru dan perilaku siswa diterapkan dalam fase pembelajaran.⁴⁴

d. Evaluasi Kurikulum

Karena program dipandang sebagai suatu kerangka kerja, hal-hal berikut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Masukan (*input*)
- 2) Proses pelaksanaan program
- 3) Hasil (*output*) program, dan
- 4) Balikan yang merupakan dampak dari program tersebut.

Validasi umpan balik kurikulum melibatkan alat penilaian yang dapat membantu layanan pengajaran seperti: keuangan, peralatan, karyawan, latar belakang sosial, dan penilaian siswa sebelum menyelesaikan kurikulum (*pretest*). Tinjauan metode melibatkan penilaian rencana pengiriman untuk program, yang berkaitan dengan siklus belajar-mengajar, saran dan konseling, pengawasan manajemen, fasilitas pengajaran dan pengukuran hasil pembelajaran.

⁴⁴Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 24.

⁴⁵*Ibid.*, 33

Dalam melakukan penilaian, yang harus diperhatikan adalah:⁴⁶

1) Sasaran Penilaian

Maksud atau tujuan penilaian pembelajaran adalah transformasi dalam tindakan emosi, afektif, dan psikomotor. Ada berbagai faktor dari masing-masing sektor dan hal-hal tertentu akan terungkap melalui tinjauan, dan orang akan melihat kebiasaan yang dia pelajari dan yang tidak puas untuk mengembangkan dan merencanakan lebih banyak program pelatihan

2) Alat Penilaian

Untuk mencapai pandangan yang tidak bias tentang hasil pembelajaran, penerapan metode evaluasi akan luas, dan melibatkan penilaian dan non-tes. Demikian juga, jenis penelitian tidak hanya studi analitis tetapi juga tes esai, sedangkan non-tes digunakan untuk menentukan faktor perilaku seperti keinginan dan sikap. Metode penilaian non-tes termasuk:

⁴⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2007).

pemeriksaan, wawancara, studi kasus dan skala peringkat. Hasil pelatihan dapat diukur termasuk:⁴⁷

a) Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ujian reguler, tinjauan umum dan akhir. Instruktur melakukan tes kelas untuk mengevaluasi kemampuan akademik dan hasil belajar siswa, untuk mengidentifikasi tantangan belajar, untuk menawarkan input untuk meningkatkan lingkungan belajar dan untuk memutuskan keberhasilan siswa.

b) Tes kemampuan dasar

Evaluasi kinerja spesifik diberikan untuk mengetahui kemampuan yang dibutuhkan untuk membaca, menulis, dan mengukur untuk meningkatkan sistem pembelajaran (program perbaikan). Pemeriksaan kemampuan khusus diberikan pada akhir setiap Kelas 3.

c) Penilaian akhir sekolah

⁴⁷ Ibid., 263.

Pada akhir setiap semester dan tahun akademik, latihan penilaian dilakukan untuk mencapai gambaran yang lengkap dan akurat tentang kelengkapan belajar siswa dalam periode waktu tertentu.

d) *Benchmarking*

Benchmarking adalah metode untuk mencapai keunggulan yang memuaskan dengan mengevaluasi kinerja, prosedur, dan hasil yang berkelanjutan. Skala keberhasilan di tingkat akademik, regional, dan nasional dapat dihitung. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan sehingga siswa dapat mencapai tingkat unit keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan keuletan bisnis mereka.

e) Penilaian program

Evaluasi sistem dilakukan secara teratur dan konsisten oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pendidikan. Tinjauan sistem dilakukan untuk menilai kesesuaian kurikulum untuk

konteks, tujuan dan sasaran pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan pertumbuhan masyarakat dan kemajuan waktu

11. Manajemen Kurikulum

a. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen secara etimologi berasal dari kata *to manage* yang berarti *to conduct or to carry on, to direct*. Dalam Kamus Inggris-Indonesia, kata *manage* diartikan “mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”. Sedangkan *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* mengartikan *manage* sebagai “*to succeed in doing something especially something difficult management the act of running and controlling business or similar organization*”.⁴⁸ Manajemen sering kali mencakup cara mencapai tujuan melalui metode perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi dalam suatu entitas atau perusahaan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengelola metode yang

⁴⁸ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

berhasil dan efisien menggunakan modal manusia dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁹

Adapun secara terminologi, banyak ahli yang memberikan pengertian manajemen dengan formulasi yang berbeda-beda. Berikut akan dikemukakan beberapa definisi manajemen menurut para ahli; Menurut Boone & Kurtz “*Management is the use of people and other resources to accomplish objective*”. George R. Terry menyatakan bahwa “Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.”⁵⁰

James A.F. Stoner menjelaskan bahwa “Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

⁴⁹ Henry L. Sisk, *Principles of Management: A System Approach to the Management Process* (England: South-Western Publishing Company, 1999).

⁵⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 2.

penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”⁵¹ Henry Fayol menyatakan “*Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives*”.⁵² Maksudnya bahwa manajemen yaitu upaya integrasi semua sumber energi melalui tahap persiapan, pengorganisasian, arahan, dan kontrol untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan masing-masing konsep di atas, beberapa titik tekanan dapat dikembangkan sehingga dapat mencirikan manajemen, yaitu, pertama, ada prosedur standar, yang terdiri dari tindakan: menyiapkan, mengoordinasikan, memobilisasi dan mengendalikan; kedua, menetapkan dan mencapai tujuan tertentu; ketiga, memaksimalkan penggunaan modal yang tersedia. Manajemen juga merupakan pengaturan timbal balik di mana metode mempersiapkan, mengoordinasikan, memobilisasi,

⁵¹ Suharsaputra, *Administrasi*, 5-6.

⁵² Usman Efendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 3-4.

dan mengelola semua modal yang diperlukan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan manajemen kurikulum adalah sebagai metode manajemen kurikulum yang sukarela, sistematis, dan terintegrasi untuk memenuhi tujuan kurikulum. Dan harus dikembangkan sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan tersebut atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dan visi dan misi lembaga pendidikan serta tidak mengabaikan kebijakan Nasional yang telah ditetapkan.⁵³ Dengan tujuan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di dalam suatu lembaga berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum sesuai dengan prinsip dan fungsi manajemen kurikulum.⁵⁴

b. Ruang Lingkup

⁵³ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 1-3.

⁵⁴ *Ibid.*, 7-11.

Ruang lingkup manajemen kurikulum mencakup persiapan, pelaksanaan, dan peninjauan tugas-tugas program. Praktik program di tingkat sekolah menyeimbangkan pemahaman dan penerapan kurikulum nasional (persyaratan kompetensi atau kompetensi khusus) dengan kebutuhan daerah dan keadaan sekolah yang terlibat, memastikan bahwa program tersebut merupakan kurikulum yang jujur bagi siswa maupun lingkungan.

c. Prinsip dan Fungsi

Ada lima konsep yang harus diingat dalam penerapan persiapan kurikulum, berikut ini:⁵⁵

- 1) Produktivitas, hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan kurikulum adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan kurikulum. Pertimbangan bagaimana siswa dapat mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum harus ditargetkan dalam manajemen kurikulum.
- 2) Demokratis, penerapan manajemen kurikulum harus difokuskan pada demokrasi, yang

⁵⁵ Ibid., 33.

menempatkan administrator, pelaksana, dan siswa dalam peran untuk melaksanakan tugas akuntabilitas lengkap untuk pencapaian tujuan kurikulum.

- 3) Kooperatif, dibutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam kegiatan pengelolaan program.
- 4) Efektifitas dan efisiensi, berbagai kegiatan manajemen program akan memahami keefektifan dan efisiensi pemenuhan tujuan kurikulum untuk memberikan hasil yang bermanfaat dengan harga, energi, dan waktu yang relatif singkat.
- 5) Menyajikan visi, tujuan dan prioritas kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat menegaskan dan mengarahkan visi, arah dan tujuan kurikulum.

Manajemen kurikulum perlu dimasukkan dalam fase pengajaran untuk memasukkan hasil kurikulum yang lebih akurat, produktif, dan memadai dalam memotivasi

berbagai outlet dan komponen kurikulum. Ada banyak peran administrasi program di dalamnya.⁵⁶

- 1) Meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya, mobilisasi modal dan elemen-elemen program melalui manajemen yang terorganisir dan efisien.
- 2) Meningkatkan peluang atau kesetaraan dan peluang bagi siswa untuk mencapai hasil maksimal, siswa dapat mencapai kemampuan maksimal tidak hanya melalui praktik intrakurikuler. Meningkatkan relevansi dan efektivitas sejalan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan di sekitar siswa, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan peluang dan hasil yang relevan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan di sekitar mereka.
- 3) Meningkatkan kualitas keberhasilan guru dan kegiatan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, manajemen program yang kompeten, efisien dan terkoordinasi akan

⁵⁶ Din Wahyudin, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), 11.

memberikan dorongan bagi keberhasilan guru dan kegiatan belajar siswa.

- 4) Meningkatkan efektivitas dan produktivitas siklus pengajaran dan pembelajaran, fase pembelajaran juga diperiksa untuk melihat kesinambungan konsep yang dirancang dan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian inkonsistensi dapat dicegah antara konsep dan eksekusi. Oleh karena itu, guru dan siswa juga didorong untuk melakukan pembelajaran yang produktif dan efisien karena jaminan lingkungan yang menguntungkan yang dihasilkan oleh kegiatan manajemen kurikulum.
- 5) Meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk membantu membuat kurikulum, kurikulum yang dijalankan secara profesional harus mencakup masyarakat, terutama dalam mengisi bahan ajar atau alat belajar yang perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan pengembangan.

d. Langkah-Langkah Manajemen Kurikulum

1) Perencanaan Kurikulum

Perencanaan tahap awal sebelum melanjutkan ke peran administrasi lainnya. Banyak statistik telah mengusulkan fase lain dalam proses persiapan pendidikan, yaitu.

a) Model Ralph Tayler: (1) menentukan tujuan, (2) memilih pengalaman-pengalaman pendidikan, (3) Mengorganisir nomor 2.

b) Model D. K. Wheeler: (1) menentukan tujuan, (2) memilih pengalaman pendidikan (belajar), (3) menentukan materi pembelajaran, (4) organisasi dan integrasi nomor 2 dan 3, (5) evaluasi terhadap efektifitas pada nomor 2, 3.4 dalam pencapaian nomor 1.

Program sebagai topik yang akan dipelajari siswa memiliki persyaratan berikut dalam siklus persiapan:⁵⁷

⁵⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Bandung: Kencana Prenada Media Grop, 2008).

- a) Persiapan kurikulum biasanya membutuhkan penggunaan penilaian profesional di bidang penelitian. Dengan menganalisis faktor sosial dan variabel pendidikan, spesialis tersebut menentukan topik yang akan diajarkan kepada siswa.
- b) Ketika memutuskan dan memilih kurikulum, banyak faktor yang perlu diatasi, seperti tingkat kerumitan, keterlibatan siswa, urutan materi pembelajaran, dan sebagainya.
- c) Perencanaan dan pelaksanaan kurikulum ditentukan oleh penggunaan pendekatan pembelajaran dan teknik yang memungkinkan siswa untuk menguasai materi pelajaran, seperti memanfaatkan pendekatan ekspositori. Persiapan kurikulum, untuk perilaku potensial. Jadi itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memiliki kekuatan. Ada dua elemen persiapan, yaitu:

- Bersifat ekonomis; kegiatan dalam program ini direncanakan secepat dan seefisien mungkin, dengan pandangan untuk meminimalkan biaya yang terlalu besar sehingga semua operasi bertujuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan sebelumnya, tanpa mengurangi efisiensi yang baik dari pengurangan biaya tersebut.
- Kesempatan terjadinya komitmen; ini menciptakan kemitraan kolaboratif dengan dewan, karyawan, dan pemangku kepentingan lain dari organisasi untuk memenuhi tujuan perencanaan.

Perencanaan pada intinya menguraikan kemungkinan acara yang akan dilaksanakan. Operasi ini dimaksudkan untuk menangani berbagai sumber daya, memastikan bahwa temuan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan.⁵⁸ Persiapan kurikulum

⁵⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 49.

adalah mekanisme organisasi yang dinamis yang melibatkan berbagai gaya dan lapisan pembuat keputusan. Kemampuan untuk menjelaskan dan mengatur metode melibatkan penggunaan templat untuk mengatasi aspek-aspek utama, tetapi presentasi pada dasarnya dapat menyederhanakan aspek-aspek tertentu dan dapat mengabaikan beberapa aspek lainnya.⁵⁹

Tujuan dari proses persiapan ini adalah untuk mengidentifikasi impian, tugas, atau pencapaian target pelaksanaan (operasional). Inisiatif ini mempertimbangkan proses (teknik), sistem keluaran yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, jumlah pengeluaran, personel yang terlibat dan mekanisme penilaian, dengan mempertimbangkan tujuan yang harus dicapai bersama dengan skenario, keadaan dan internal dan variabel eksternal.

2) Pelaksanaan Kurikulum

Penting untuk memperhatikan hal-hal berikut ketika menerapkan kurikulum: *Pertama,*

⁵⁹ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 152.

pembelajaran akan menempatkan fokus yang lebih besar pada pengalaman, baik di laboratorium dan di masyarakat dan di bidang pekerjaan. Dalam situasi ini, seorang instruktur harus bersedia untuk memilih dan memanfaatkan pendekatan dalam praktik pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengalami apa yang mereka lakukan. *Kedua*, pembelajaran harus dapat menciptakan hubungan antara sekolah dan lingkungan, dalam hal ini instruktur harus bersedia dan jeli untuk mempertimbangkan sejumlah kelompok yang mungkin yang dapat digunakan sebagai sumber belajar sebagai jembatan antara sekolah dan lingkungan. *Ketiga*, lingkungan belajar yang kolaboratif dan inklusif perlu dibangun oleh pembelajaran interaktif. *Keempat*, penelitian harus difokuskan pada masalah khusus yang secara spesifik relevan dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat. *Kelima*, model pembelajaran kelas bergerak perlu dibangun untuk setiap bidang studi, dan kelas menjadi laboratorium untuk setiap

bidang studi, sehingga dalam satu kelas, dilengkapi dengan fasilitas khusus dan alat belajar diperlukan dalam pembelajaran tertentu.⁶⁰

Pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua tahap, yaitu presentasi kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas:

- a) Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum dalam pengaturan ruang kelas yang dia awasi, karena Kepala Sekolah sebagai pengawas melibatkan mengawasi pengiriman kurikulum, Kepala Sekolah adalah koordinator kurikulum dan berperan dalam persiapan sistem, pemantauan dan penilaian personil sekolah .
- b) Orang yang mengambil peran penting dalam pelaksanaan program tingkat kelas adalah guru dan terdiri dari tiga bentuk tugas instruksional, termasuk yang

⁶⁰ Rugaiyah and Atik Simiati, *Profesi Kependidikan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

bertanggung jawab untuk melaksanakan:
(1) latihan belajar mengajar, (2) praktik pembinaan ekstrakurikuler, (3) instruksi dalam tugas les.⁶¹

Mengembangkan kurikulum membutuhkan kerja sama yang baik dari organisasi sekolah.⁶²

Mengorganisir sesi perencanaan kurikulum adalah media terbaik untuk membahas pertanyaan-pertanyaan program, seperti adopsi, konsekuensi dan topik yang relevan dengan kurikulum sekolah.

3) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum memainkan peran penting baik dalam memutuskan kebijakan sekolah secara umum maupun dalam mengimplementasikan keputusan dalam program. Pemegang keputusan pendidikan dan arsitek program dapat menggunakan temuan dari penilaian kurikulum untuk memilih dan menilai strategi untuk meningkatkan kerangka sekolah dan model kurikulum yang digunakan.

⁶¹ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 180.

⁶² *Ibid.*, 181.

Sementara itu, menurut Nana Sudjana menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam prosesnya termasuk upaya mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan nilai sesuatu yang merupakan objek kerja, hasil program, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, evaluasi terkait dengan proses serta alat untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang berfungsi sebagai input untuk menentukan keputusan.⁶³

Tujuan dari penilaian kurikulum adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan hasil pengajaran yang ingin dicapai oleh program yang terlibat.⁶⁴ Metrik keberhasilan yang diukur di sini adalah kemandirian rencana. Dalam konteks yang luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk mengevaluasi seluruh

⁶³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 133.

⁶⁴ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), 43.

kurikulum dalam berbagai parameter. Metrik keberhasilan yang diukur adalah keberhasilan, signifikansi, kualitas, dan kelayakan program.⁶⁵

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dikembangkan asumsi bahwa manajemen kurikulum pada umumnya menekankan pada teknik yang berhasil dan efisien mengendalikan siklus pengajaran untuk menghasilkan hasil pendidikan tertinggi. Di antara faktor-faktor tertentu, metode pembelajaran tampaknya menjadi penentu standar sekolah. Meskipun demikian, semua komponen masih dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

12. Pendidikan Inklusif

a. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah mekanisme yang dimaksudkan untuk memenuhi minat semua

⁶⁵ S. Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 43.

peserta didik. Langkah-langkah berbeda dapat dilakukan dengan memperbarui dan menyesuaikan bahan, metode, kerangka kerja dan teknik yang akan memenuhi minat semua siswa sesuai dengan kelompok usia mereka. Pendidikan inklusif berlanjut dengan kurikulum non-diskriminatif untuk semua orang, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah orang-orang dengan cacat medis yang berselang-seling (intermittent) atau seumur hidup dan mereka memerlukan perubahan pada program pendidikan khusus.

Menerapkan pendidikan inklusif memungkinkan sekolah untuk membuat perubahan yang responsif terhadap kebutuhan siswa tertentu dalam hal pengajaran, fasilitas pengajaran dan lingkungan belajar. Kualitas pendidikan juga akan memastikan bahwa anak yang sedang tumbuh menerima perawatan untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya.

Dalam arti pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusif bukan satu-satunya cara untuk mengajar anak-anak cacat dengan

maksud untuk mengganti pendidikan terpisah yang secara tradisional telah digunakan sebagai model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Namun pilihan alternatif, kreativitas, solusi modern dalam kaitannya dengan kurikulum terpisah yang telah berjalan lebih dari satu abad. Kehadiran lembaga yang luar biasa, yang akan dapat memainkan peran dalam mempromosikan inklusi sebagai pusat sumber daya, belum termotivasi secara maksimal.⁶⁶

Inklusif adalah suatu sistem ideologi yang dilandasi wawasan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa “Pendidikan bagi setiap anak bangsa di negeri ini memiliki arti dan makna mendalam sebagai pemelihara dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa.”⁶⁷

Pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat,

⁶⁶ Leni Florian, *Special or Inclusive Education: Future Trends* (Britishish: Journal of Special Education, 2008), 123.

⁶⁷ Yamin, *Ideologi Kebijakan Pendidikan Menuju Pendidikan Berdelogis Dan Berkarakter* (Malang: madani, 2013).

berharkat, dan bermartabat. Sehingga dalam konteks yang demikian, pendidikan bertujuan menanamkan prinsip-prinsip persatuan dan perdamaian di antara semua elemen negara, terlepas dari status sosial, ras, budaya, agama, adat, dll. Pendidikan adalah senjata yang akan menyatukan semua anak bangsa dalam satu posisi yang disebut NKRI di bawah bendera Merah Putih, beserta filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Senada dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah “bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi motor pembentukan karakter dan moralitas anak.”⁶⁸ Pendidikan inklusif memberikan kesempatan anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.⁶⁹

Pendidikan inklusif menurut para ahli; Staub dan Peck mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah “penempatan anak berkelainan

⁶⁸ Ibid., 177.

⁶⁹ Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Mengenal Pendidikan Terpadu* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2004), 111.

tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas regular.”⁷⁰ Ini menunjukkan bahwa ruang kelas harian adalah bidang pembelajaran yang penting bagi anak-anak autis terlepas dari jenis gangguan dan terlepas dari gradasinya. Kata O’Neil “pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular bersama-sama teman seusianya”. Melalui sekolah inklusif, anak-anak autis diajarkan seperti anak-anak biasa lainnya untuk memaksimalkan kemampuan mereka.⁷¹

Thomas Lombar di dalam diskusinya tentang *responsible inclusion* menyatakan bahwa “siswa penyandang hambatan punya hak untuk diberi pengajaran dengan teman-temannya di tempat-tempat terpadu”.⁷² Inklusif yang bertanggung jawab menyiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat terintegrasi. Dan inklusif yang

⁷⁰ Staub and Peck, *What Are the Out Come for Nondisable Students?* (Boston: Educational Leadership, 1994).

⁷¹ Sue Stubbs, *Pendidikan Inklusif Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*, Terj. Susi Septaviana (Bandung: UPI, 2002).

⁷² J. David Smith, *Sekolah untuk Semua*, terj. Denis (Bandung: Nuansa Cendikia, 2006), 401-402.

bertanggung jawab tidak meninggalkan siswa begitu saja di program dan kelas reguler tanpa sistem dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan.

Pernyataan dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*, dinyatakan bahwa:

*Inclusive education means that : "... schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups.*⁴⁸

Pendidikan inklusif berarti sekolah harus melayani semua siswa, terlepas dari kondisi fisik, mental, keuangan, emosional, linguistik atau lainnya. Ini termasuk anak-anak penyandang cacat dan anak-anak berbakat, anak jalanan dan perempuan pekerja, gadis-gadis dari masyarakat pedesaan dan nomaden, anak-anak dari bahasa, ras minoritas dan budaya dan anak-anak dari tempat-

tempat yang rentan atau kelas-kelas yang kurang beruntung lainnya.⁷³ Pendidikan inklusif menurut UNESCO:

“At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important is the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child (UN, 1989). A logical consequence of this right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on.”⁷⁴

Pendidikan inklusif adalah pusat hak sipil untuk pencapaian pendidikan. Ini disebutkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1949. Hak anak-anak untuk tidak didiskriminasi adalah nilai wajar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak. Implikasi moral dari hak ini adalah bahwa semua anak berhak menerima suatu bentuk pendidikan

⁷³ UNESCO, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (Paris: Author, 1994).

⁷⁴ Sue Stubbs, *Pendidikan Inklusif*, 125.

yang tidak mendiskriminasi atas dasar kecacatan, ras, budaya, bahasa, kelas, keterampilan, dll.⁷⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemahaman bahwa: pendidikan inklusif memberikan nilai bagi semua siswa, terlepas dari kemampuan atau ketidakmampuan mereka, kelas, status, sosial-ekonomi, ras, konteks budaya, bahasa dan agama bertemu dalam kelompok sekolah yang sama. Kurikulum inklusif adalah kerangka kerja pembelajaran perspektif multikural yang dapat membantu siswa menghargai, merangkul, dan mendukung semua individu dari beragam ras, sejarah, kepercayaan, identitas, dan pekerjaan fisik dan psikologis.

Dalam arti yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dipahami sebagai mode reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti-diskriminasi, perjuangan untuk perlakuan dan kesempatan yang sama, keadilan dan perluasan akses ke pendidikan untuk semua, meningkatkan standar pendidikan, politik upaya untuk

⁷⁵ UNESCO, *Final Report: World Conference on Special Needs Education: Acces and Quality*. Paris: UNESCO, 1994).

menyelesaikan pendidikan wajib sembilan tahun dan upaya untuk mengubah sikap orang terhadap pendidikan yang lebih dingin.⁷⁶

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memperhatikan bagaimana sistem sekolah harus diubah sehingga dapat beradaptasi dengan keragaman siswa membantu guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman. Memberikan pendidikan berkualitas di lingkungan yang inklusif untuk semua siswa adalah tantangan, keinginan dan masalah dalam pendidikan serta fitur-fitur dari sekolah prospektif.

Pendidikan reguler dengan fokus multikultural adalah alat yang kuat untuk melawan pandangan rasis, merangkul keragaman, membangun komunitas yang ramah, mengembangkan budaya multikultural, dan mendidik semua.⁷⁷

b. Filosofi, Karakteristik, dan Ciri-ciri Pendidikan Inklusif

⁷⁶ MD Skjorten, *Towards Inclusion, Education-Special Needs Education An Introduction* (Oslo: Unipub Forlag, 2001).

⁷⁷ Smit, *Sekolah Inklusif*, 407.

Filosofi inti pendidikan multikultural adalah sama dengan ideologi nasional *Bhineka Tunggal Ika* karena para pemimpin bangsa menanamkan ideologi pluralitas ke dalam kehidupan negara tetapi memiliki tekad yang sama. Pada dasarnya, variasi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari normalitas. Meskipun hal-hal yang harus disyukuri. Karena semua manusia dapat bekerja dengan perbedaan dan menyeimbangkan kelemahan masing-masing. Karena itu perbedaan antara manusia tidak harus dilihat secara ketat, karena pluralitas adalah hal yang normal dalam masyarakat.

Visi perawatan sosial untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah untuk mengambil pendekatan humanis untuk layanan pendidikan. Pandangan Humanisme dipandang sebagai manusia yang adil dan dengan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti halnya semua manusia. Pendidikan inklusif sebagai media yang tepat diperlukan untuk menerima pendidikan untuk semua orang, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus yang haknya belum terpenuhi

untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lain.⁷⁸ Ini termasuk dalam mempromosikan pendidikan yang adil adalah gagasan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan dalam suasana yang sama dengan semua anak "normal", baik karena gangguan kognitif fisik, mental dan bakat cerdas.⁷⁹ Secara lebih umum, ini dapat diterjemahkan sebagai menyiratkan bahwa anak-anak "normal" serta orang lain yang diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus harus diajarkan bersama dalam komunitas yang berperan di dalamnya, di dalam ruang kelas. Kami tidak hanya mencari keterampilan intelektual melalui kurikulum holistik ini, tetapi lebih dari itu, kami belajar tentang kehidupan itu sendiri.

Pendidikan inklusif memiliki empat ciri penting, yaitu: (1) Pendidikan inklusif adalah mekanisme yang berkembang dalam upayanya mengidentifikasi cara-cara untuk beradaptasi dengan keunikan masing-masing pelajar; (2) Pendidikan inklusif menyiratkan peluang untuk

⁷⁸ Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, 41-42.

⁷⁹ *Ibid.*, 121.

mengatasi tantangan belajar bagi peserta didik; (3) Pendidikan inklusif berarti bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk bersekolah (sekolah); (4) terlibat dan mencapai signifikansi dalam belajar.⁸⁰ Ini berarti bahwa tanggung jawab untuk mencapai sekolah wajib untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus telah menjadi perhatian berbagai kelompok dan bahwa ABK dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik dengan belajar bagaimana hidup bersama dalam komunitas inklusif.

Karakteristik utama dalam menerapkan pendidikan inklusif adalah: (1) Mengakomodasi semua anak (non-diskriminatif), sistem sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak, anak belajar bersama dengan kelompok sebaya, masalahnya terletak pada sistem bukan pada anak, masing-masing manfaat anak dari sekolah yang sama dan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang lebih menyenangkan. (2) Sikap positif guru dan teman sebaya terhadap anak berkebutuhan khusus dan guru khusus akan membangun suasana

⁸⁰ Ibid., 42.

pembelajaran yang ramah, konstruktif, partisipatif, dan interaktif; dan meningkatkan sikap siswa yang positif melalui *class meeting* dan *action plan*.⁸¹

Implementasi pendidikan inklusif memiliki sisi menguntungkan karena mampu menciptakan pemahaman dan kesepakatan tentang manfaat dalam pendidikan inklusif sambil menghilangkan perilaku dan kepercayaan yang bias, melibatkan dan memotivasi kelompok untuk memeriksa masalah pendidikan lokal, mengumpulkan pengetahuan, semua anak dalam setiap program dan mengenali penyebab mengapa mereka tidak pergi ke sekolah, identifikasi.

c. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkelainan atau anak yang mengalami rintangan "*handicapped children*" yang kadang-kadang juga disebut dengan anak cacat atau anak dengan ketidakmampuan, "*children with impairment/disabilities*", "*exceptional children*" atau "*children with special educational needs*",

⁸¹ J. Loreman, T. Deppeler and Harvey D, *Inclusive Education: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom* (NSW: Allen & Unwin, 2005).

adalah seseorang yang menderita gangguan mental, fisik, sosial dan / atau emosional karena beberapa alasan dan dengan demikian mencegah pertumbuhan dan perkembangan alami anak.⁸²

Menurut William Cruickshank dan G, dalam bukunya *Exceptional Children and Youth*. Orville Johnson, persepsi anak-anak itu istimewa: “*Essentially, an exceptional child is one who deviates intellectually, physically, socially or emotionally, so markedly from what is considered to be normal growth and development that he cannot receive maximum benefit from a regular school program and requires a special class or supplementary instruction and services*”.⁸³

Ini berarti bahwa anak-anak penyandang cacat pada dasarnya adalah anak-anak dengan variasi mental, fisik, sosial atau emosional yang substansial dari apa yang disebut pertumbuhan dan

⁸² Rudiwati, *Potret Sekolah Inklusif*, 4.

⁸³ William Cruickshank dan G. Orville Johnson, *Exceptional Children and Youth* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1958), 3.

perkembangan alami, mereka tentu saja tidak dapat memperoleh manfaat terbesar dari sistem sekolah umum dan memerlukan kursus khusus atau instruksi tambahan dan sumber daya spesifik.

Menurut K. Eileen Allen dalam buku *Mainstreaming in Early Childhood Education*, mengenai anak berkelainan atau anak yang mengalami rintangan/cacat “*handicapped child*” dapat dijelaskan istilah *handicap* sebagai berikut:

“...*the term handicapped has a broad meaning... It refers to one or more instances of the following: any condition which delays a child's normal growth and development; any condition which distorts (makes abnormal or atypical) a child's normal growth and development; any condition which has a severe negative effect on a child's normal growth and development or adjustment to life.*”⁸⁴

Kata penyakit / hambatan untuk menghadapi memiliki definisi luas. Ini mengarah pada satu atau lebih dari yang berikut: kondisi apa yang mencegah pertumbuhan dan perkembangan

⁸⁴ K. Eileen Allen, *Mainstreaming in Early Childhood Education* (New York: Delmar Publisher Inc, 1980), 2.

normal anak; segala kondisi yang menyimpang (membuat tidak normal atau abnormal) dari pertumbuhan dan perkembangan normal anak; segala kondisi yang memiliki dampak sangat negatif pada pertumbuhan dan perkembangan atau penyesuaian kehidupan normal anak.

Bergantung pada definisi yang disebutkan di atas, apa yang didefinisikan dari seorang anak cacat atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus adalah seorang anak yang karena alasan apa pun, memiliki kelainan tertentu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal anak; yang menyimpang (membuat tidak normal atau tidak teratur) dari pertumbuhan dan perkembangan normal anak dan gangguan apa yang memiliki efek yang sangat negatif pada pertumbuhan anak. Anak mengalami penyimpangan mental, fisik, sosial, atau emosional yang substansial dari apa yang disebut perkembangan dan pertumbuhan alami. Kita tentu saja tidak dapat memperoleh manfaat penuh dari sistem sekolah umum, yang membutuhkan kursus

khusus atau pelatihan tambahan dan fasilitas pendidikan khusus lainnya.

Berdasarkan laporan tersebut di atas, dapat dicatat bahwa pendidikan inklusif adalah program pendidikan di mana semua anak dan anak-anak penyandang cacat atau kebutuhan khusus mencari layanan pendidikan komprehensif bersama dengan anak-anak pada umumnya. Sekolah juga harus melayani semua anak tanpa mengabaikan kebutuhan fisik, mental, keuangan, kognitif, linguistik atau lainnya, terutama anak-anak penyandang cacat atau anak-anak berbakat.

Sistem pendidikan ABK terus tumbuh dengan pertumbuhan teknologi baru yang dapat mendorong peningkatan di lingkungan belajar. Keberadaan pendidikan inklusif sebagai ide kreatif dan progresif yang memungkinkan semua anak Indonesia memperoleh pendidikan tanpa melihat sejarah kehidupan. Foreman mengklarifikasi bahwa telah terjadi gradasi dalam pembelajaran yang secara khusus terkait dengan kebutuhan pendidikan khusus para penyandang cacat atau anomali, dimulai dengan sistem segregasi sekolah, sekolah

formal, dan pengajaran holistik. Dari tiga sistem pendidikan yang memiliki efek signifikan pada sistem sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, pendidikan komprehensif adalah kerangka kerja paling ideal untuk mempertahankan potensi mereka.⁸⁵

Kehadiran pendidikan inklusif dalam sistem sekolah modern akan tampaknya menjadi solusi bagi filosofi pendidikan tradisional untuk semua. Kurikulum inklusif adalah iterasi baru dari paradigma pendidikan untuk anak-anak yang rentan. Tetapi anak-anak penyandang cacat, jika mereka memiliki perawatan yang tepat, akan menciptakan pekerjaan yang luar biasa.⁸⁶ Oleh karena itu inklusivitas adalah karakteristik calon perguruan tinggi.

Pendidikan inklusif telah mengalami pertumbuhan yang kuat di Indonesia. Namun, pada titik implementasi, ia juga menghadirkan banyak

⁸⁵ Mughtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 12.

⁸⁶ Tito Rajashi Mukhopadhyay, *Pohon Cerdas: Catatan Menakjubkan Seorang Anak Autis*, Terj. Mieke Gembirasari (Bandung: Nuansa, 2007), 7.

tantangan, keprihatinan, dan keprihatinan yang perlu ditangani dengan hati-hati agar pelaksanaannya tidak menghambat inisiatif dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri, yang tetap sesuai dengan prinsip dan konsep dasar. Untuk tujuan inilah diperlukan dedikasi dan kerja keras tingkat tinggi untuk menegakkannya melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Konsekuensinya, tujuan utama dari semua upaya pembangunan tersebut adalah perlindungan para penyandang cacat dalam mengamankan semua hak mereka karena warga negara dapat dipahami dengan mudah dan optimal.⁸⁷

d. Model-model Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia sesuai dengan pandangan Vaughn, Bos & Schumn di Divisi Pengembangan Sekolah Khusus, yang mengklaim bahwa 'Pada kenyataannya, kata inklusif digunakan secara bergantian dengan kata' pengarusutamaan, 'yang

⁸⁷ Triantoro Safaria, *Autisme Pemahaman Baru untuk Hidup Bermakna bagi Orang Tua* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 99.

digambarkan sebagai penawaran yang sesuai. fasilitas pendidikan langsung untuk anak-anak penyandang cacat / kebutuhan pendidikan menurut individu.⁸⁸ Transfer tidak permanen, tetapi sementara; dengan demikian siswa penyandang cacat diizinkan untuk bergerak secara fleksibel dari satu fasilitas pendukung ke yang lain, kecuali jika tujuan persyaratan tertentu bergeser. Teori ini komprehensif tetapi menawarkan berbagai program pelengkap yang sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka dalam praktik. Gaya ini juga dijuluki moderat egaliter.

Mengacu pada pandangan Vaughn, Bos & Schumn di Departemen Desain Sekolah Khusus, penempatan anak-anak cacat / kondisi pendidikan khusus di sekolah-sekolah komprehensif di Indonesia dapat dicapai dengan menggunakan berbagai templat, yaitu:

1) Kelas reguler “ *Full Inclusion* ”.

Anak-anak penyandang cacat atau kebutuhan pendidikan khusus belajar seperti siswa lain

⁸⁸ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Dit. PSLB Depdiknas, 2008), 6-10.

pada siang hari di ruang kelas harian / komprehensif menggunakan program yang sama dengan anak-anak pada umumnya.

2) Kelas Reguler dengan *cluster*

Anak-anak dengan autisme / kebutuhan perkembangan khusus berpartisipasi dalam kelas reguler / inklusif bersama siswa lain dalam kelompok khusus.

3) Kelas reguler dengan *pull out*

Anak-anak penyandang cacat atau kebutuhan pendidikan khusus berpartisipasi dalam kelas reguler/inklusif bersama dengan siswa lainnya, tetapi pada beberapa kesempatan ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber daya untuk belajar dan mendapatkan layanan dukungan dari guru swasta atau tutor pribadi.

4) Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

Anak-anak penyandang cacat atau kebutuhan pendidikan khusus belajar di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus bersama dengan anak-anak lain, dan pada waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas

reguler/inklusif ke ruang bimbingan belajar/ruang sumber daya dan menerima layanan bimbingan dari guru khusus/guru khusus.

5) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak-anak penyandang cacat atau kebutuhan pendidikan khusus untuk belajar dan mencari layanan dukungan dari Guru Berkualitas di kelas khusus di sekolah reguler/inklusif; tetapi di beberapa daerah mereka akan berpartisipasi dalam kelas reguler/inklusif dengan anak-anak lain

6) Kelas khusus penuh;

Untuk ruang kelas khusus untuk sekolah normal atau komprehensif, siswa dengan autisme atau kebutuhan pendidikan khusus mengetahui dan menerima layanan dukungan dari guru yang berkualifikasi atau guru pembimbing yang berkualitas. Untuk anak-anak dengan kondisi pendidikan khusus yang bentuk dan tingkat cacatnya diidentifikasi sebagai parah; memberikan lebih banyak fleksibilitas di sekolah reguler/inklusif di ruang

kelas dengan sumber daya terbatas yang tersedia. Untuk anak-anak penyandang cacat/kondisi pendidikan khusus, bentuk dan tingkat gangguannya agak serius, dan pembelajaran di sekolah reguler / inklusif tidak dapat dialokasikan ke sekolah khusus atau yang disebut sekolah khusus / SLB atau rehabilitasi / layanan sosial dan “*Hospital School*”.⁸⁹

Sekolah inklusif dapat memilih model mana yang akan diterapkan secara fleksibel yang berarti bahwa suatu hari mereka dapat mengubah model; karena faktor-faktor yang berbeda, berdasarkan pada isu-isu berikut: (1) Jumlah anak-anak cacat / kebutuhan pendidikan khusus dilayani; (2) Bentuk dan tingkat kelainan anak; (3) Penyediaan modal manusia (SDM) termasuk Guru Khusus; dan(4) Sarana dan prasarana yang tersedia.⁹⁰

89

Ibid.

⁹⁰ Ibid., 13.

e. Landasan Pendidikan Inklusif

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada landasan yuridis, pedagogis, agama dan empiris dan digambarkan sebagai berikut:⁹¹

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah seperangkat wawasan atau cara berpikir yang menjadi dasar pendidikan inklusif, termasuk Kesatuan filosofis dalam Keanekaragaman, Agama, dll.

- a) Filosofi Bhineka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibudidayakan dengan lambang Negara Burung Garuda yang memiliki moto Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu jua) yang berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui keanekaragaman dalam hal etnis, dialek, adat, kepercayaan, tradisi, dan budaya adalah harta nasional permanen yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁹¹ Takdir Illahi, *Pendidikan Inklusif*, 77-79.

- b) Pandangan Agama. Di antara agama-agama Indonesia (khususnya Islam) ditekankan bahwa: (1) manusia dilahirkan di tanah suci, (2) manusia dibentuk secara unik (termasuk) untuk cinta bersama, (3) kebesaran ilahi di hadapan Allah tidak dikaitkan dengan fisik tetapi ketaqwaannya.⁹²
- c) Pandangan mendasar Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang adil, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan.
- d) Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang berfokus pada semangat transparansi untuk mengakomodasi semua kelas siswa. Kurikulum inklusif menggabungkan pengalaman holistik ke dalam sekolah yang dapat membantu siswa mengidentifikasi, merangkul dan menghargai individu lain dari beragam etnis, kepercayaan, nilai-nilai,

⁹² Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, 44-47.

sikap, kemampuan mental dan fungsi fisik dan psikologis.⁹³

- 2) Landasan yuridis didasarkan kepada ketentuan Undang-undang yang ada dan telah disahkan, meliputi Yuridis berskala Nasional dan Internasional.⁹⁴
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 31. Ayat 1 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat 2 bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
 - b) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1-4.
 - c) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 48 dan pasal 49.
 - d) Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 5

⁹³Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, *Modul Bimbingan Karir Pendidikan Inklusif* (Jakarta: PKLK 2016), 7-11.

⁹⁴ Ibid.

- e) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 127 sampai dengan pasal 142.
- f) Permendiknas nomor 70 tahun 2009 berkaitan dengan sekolah inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus.
- g) Surat Edaran No. 380 / C.C6 / MN / 2003 dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Departemen Pendidikan Nasional, 20 Januari 2003: Setiap kabupaten / kota diberi mandat untuk mengoordinasikan dan membangun pendidikan komprehensif di setidaknya empat dari sekolah yang menerapkannya, terdiri dari: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan SMK.
- h) Deklarasi Bandung “Indonesia menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 8-14 Agustus.⁹⁵
- i) Deklarasi Bukit Tinggi tahun 2005 yang salah satu kebijakan yang tertera bahwa

⁹⁵ Smith, *Sekolah Inklusif*, 443-444.

peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh akan menjamin bahwa strategi Nasional untuk “Pendidikan untuk Semua” adalah benar-benar untuk semua.⁹⁶

j) *Salamanca Statement and framework for Action on Special Needs Education* (1994).

3) Landasan Paedagogis

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, landasan pedagogis dicerminkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun kemampuan siswa untuk menjadi pribadi yang beriman dan berkomitmen kepada Kristus, baik, aman, cerdas, warga negara yang kompeten, imajinatif, otonom, dan demokratis serta bertanggung jawab. Dan melalui sekolah, siswa yang kurang beruntung dikembangkan menjadi orang yang dapat memahami perbedaan dan terlibat dalam masyarakat. Tujuan itu akan tercapai jika anak ABK tidak lepas dari kehidupannya sejak awal. Ini memastikan mereka memiliki kesempatan untuk bermain dan

⁹⁶ Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, *Modul*, 11.

berpartisipasi dalam ruang kelas harian seperti rekan-rekan mereka.

4) Landasan Empiris

Sejak 1980-an pekerjaan di sekolah komprehensif telah dilakukan di beberapa negara Barat. *National Academy of Sciences* (AS) memelopori sains skala besar.⁹⁷ Temuan menunjukkan ketidakefektifan dan prasangka dalam mengklasifikasikan dan menempatkan anak-anak penyandang cacat, kategori atau tempat khusus. Program ini menyarankan memberikan perawatan khusus berdasarkan tes diagnosis yang benar. Beberapa ahli menyarankan bahwa identifikasi dan penempatan anak-anak cacat yang tepat sangat sulit karena karakteristiknya yang heterogen.⁹⁸ Pada gilirannya, konsep sekolah komprehensif mulai diadopsi di Inggris, dengan perubahan yang nyata dalam paradigma kurikulum untuk

⁹⁷ Smith, *Sekolah Inklusif*, 41.

⁹⁸ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 7.

anak-anak dengan kebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.⁹⁹

13. Kurikulum Pendidikan Inklusif

a. Pengertian Kurikulum Pendidikan Inklusif

Dalam buku *Teaching in Inclusive School Communities* yang ditulis oleh John Wiley & Sons Australia mengemukakan bahwa:

*Official curriculum document in both New Zealand, stress the curriculum is for all students in Australia: The Australian curriculum is based on the assumptions that each student can learn and the need of every student are important. It enables high expectations to be set for each student as teachers account for the current level of learning of individual students and the different rates at which students develop.*¹⁰⁰

Dapat dipahami bahwa kurikulum Australia didasarkan pada asumsi bahwa setiap siswa dapat belajar dan kebutuhan setiap anak itu penting. Ini memungkinkan harapan yang tinggi untuk ditetapkan bagi setiap siswa di mana guru

⁹⁹ Garnida, *Pendidikan Inklusif*, 43.

¹⁰⁰ John Weley & Sons Australia Ltd., *Teaching Inclusive School Communities* (Australia: Jude MacArthur, 2012), 272-273.

memperhitungkan tingkat pembelajaran dan perbedaan anak di mana siswa berkembang.

Dikemukakan di dalam buku yang sama *“The curriculum is non sexist, non racist and non discriminatory; it ensures that students identities, languages, abilities, and talents are recognized and affirmed and their learning needs are addressed”*.

Bahwa kurikulum untuk semua siswa dalam prinsip inklusif: kurikulumnya tidak bersifat seksis, non rasis dan tidak diskriminatif. Ini memastikan bahwa identitas, bahasa, kemampuan, dan bakat siswa dikenali dan ditegaskan dan kebutuhan belajar mereka ditangani. Maka dari kedua pengertian tersebut bahwa pada dasarnya kurikulum dalam pendidikan inklusif mentransformasikan sistem sekolah agar sesuai dengan karakteristik PDBK.

Dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa program tersebut adalah kumpulan rencana dan pengaturan untuk tujuan, konten dan alat pengajaran, prosedur evaluasi, serta strategi yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan

pembelajaran. latihan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Alat untuk kurikulum sekolah termasuk silabus, jadwal kurikulum pembelajaran atau rencana pelajaran, perlengkapan pengajaran dan sumber penilaian.

Menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah umum standar di sekolah umum untuk memperkenalkan pendidikan inklusif. Ini dimaksudkan dengan menggunakan program di sini menggunakan Standar Informasi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang sama dengan BNSP yang dikeluarkan sekolah umum. Secara umum, silabus dan rencana pelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dan umum (ABK) adalah sama. Artinya para pendidik di sekolah inklusif tidak membedakan RPP bagi siswa ABK dan siswa normal, hal ini dikarenakan mereka belajar di kelas reguler/menyatu dengan pembelajaran siswa normal. Namun meskipun RPPnya sama di dalam pelaksanaan pembelajaran tentu berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus/PDBK.

Peserta didik yang merupakan subjek yang dilayani memiliki karakteristik yang berbeda, maka rencana program pembelajaran disusun berbeda pula. Terlebih lagi karakteristik setiap peserta didik berkebutuhan khusus sangat spesifik dan individual misalkan sama-sama menderita *spectrum autisme* namun karakteristik dan kebutuhan siswa berbeda, oleh karena itu program pembelajaran harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan. Di sinilah fungsi dari *shadow teacher* atau disebut dengan Guru Pendamping Khusus/ GPK. Program pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan individual peserta didik dikenal dengan Program Pembelajaran Individual/PPI. Dalam pembelajaran sekolah inklusif hanya PDBK yang mempunyai PPI yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan dan karakteristik serta perkembangan PDBK dan dalam pelaksanaannya PDBK didampingi oleh GPK.

Dalam bukunya *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Garnida memaparkan bahwa: ¹⁰¹Semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

¹⁰¹ Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, 107.

menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum, hanya pada ketika anak-anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan perawatan khusus, proses belajar mengisolasi mereka dari anak-anak lain. Ini memastikan bahwa perubahan program berlangsung selama proses pembelajaran, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini dicapai karena ABK bervariasi dalam tantangan dan keterampilan.

Menggunakan tiga kerangka kerja program untuk memasukkan sekolah inklusif, yaitu program umum, kurikulum perubahan, dan kurikulum individual; Implikasi dengan menggunakan tiga model program dan variasi dalam fitur siswa yang berbeda di ruang kelas yang komprehensif, kita membutuhkan kerangka kerja penilaian yang kuat yang dapat digunakan untuk menguji semua kompetensi akademik siswa. Keragaman siswa memungkinkan dalam proses pengembangan kurikulum dan perencanaan program pembelajaran individu, untuk merencanakan kurikulum yang berbeda dari yang lain.

Implementasi sistem pendidikan inklusif berupaya membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka dan mengatasi tantangan perkembangan yang dihadapi dalam menciptakan ruang kelas inklusif sejauh mungkin, dan untuk membantu para guru dan orang tua menciptakan strategi pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus baik di rumah maupun di sekolah.

Tiga jenis kurikulum yang digunakan dalam sekolah komprehensif termasuk kurikulum sekolah standar, kurikulum sekolah tradisional yang direvisi dan kurikulum individual. Kurikulum reguler adalah model kurikulum di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus, sama seperti siswa lain di kelas yang sama, mengikuti kurikulum umum. Rencana layanan lebih difokuskan pada siklus belajar, inspirasi, dan siklus ketekunan.

Model kedua adalah program pendidikan standar, diperbarui untuk memasukkan pendidikan yang menggabungkan kurikulum umum dengan instruksi pembelajaran yang disesuaikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pengembangan Kurikulum Operasional dilakukan dengan

memodifikasi kurikulum umum yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Melalui program penyesuaian ini, ABK diharuskan untuk dapat mengambil pelajaran bersama anak-anak populer / non-ABK lainnya secara klasik di sekolah umum.

Model ketiga adalah pendekatan yang dipersonalisasi yang menggabungkan pendekatan individual untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, dalam gaya rencana pembelajaran individu sesuai dengan kepribadian dan fitur mereka, dan kurikulum ini juga disebut sebagai program pembelajaran individu / IPP.¹⁰² Program pendidikan inklusif adalah unit pengajaran yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menggunakan program di tingkat unit pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan keterampilan siswa sesuai dengan kekuatan, preferensi dan kemampuan mereka. Siswa dengan kebutuhan khusus yang tidak dikelilingi oleh hambatan akademik menggunakan Program Pendidikan

¹⁰² John Weley & Sons Australia Ltd., *Teaching Inclusive School*, 277.

Nasional. Anak-anak dengan kebutuhan perkembangan diikuti oleh keterbatasan perilaku, biasanya disebut sebagai kurikulum yang diadaptasi, dapat mengikuti kurikulum persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sekolah.¹⁰³

Kurikulum yang dimodifikasi adalah produk dari memodifikasi instruksi tradisional / satuan pendidikan normal untuk keterampilan siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus memerlukan rancangan atau penyesuaian program yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tergantung pada kondisi atau keadaan khusus mereka.¹⁰⁴ Hal ini senada dengan apa yang dingkapkan oleh Loreman dalam bukunya *Inclusive Education* yang menyatakan bahwa “*The careful and systematic structuring of appropriate goals for a child with diverse abilities through the adaptation and modification of the regular curriculum is viewed by many as an excellent method of providing an*

¹⁰³ Direktorat Pembinaan PK-LK, *Pola Pendampingan dan Implementasi Pendidikan Inklusif yang Menyenangkan* (Jakarta: Kemendikbud, 2013), 77-79.

¹⁰⁴ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 171.

*appropriate education while also allowing for inclusion in a regular class”.*¹⁰⁵

Dengan demikian manajemen kurikulum pendidikan inklusif adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara terencana serta melalui tahapan yang sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui inovasi berupa pendidikan inklusif bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh ABK dan peserta didik normal lainnya dengan menggunakan kurikulum standar nasional pendidikan yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ABK dengan tujuan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

b. Program Pembelajaran Individual

Sistem perencanaan manusia disusun untuk menunjukkan kegiatan untuk satu anak dengan

¹⁰⁵ Loreman, *Inclusive School: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom* (Singapore: South Wind Productions, 2005).

kebutuhan khusus / PDBK. Penerapan Program Pendidikan Individual Individual sekolah (PPI) akan memasukkan dalam sekolah standar program dukungan pendidikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus yang merupakan rencana khusus yang dikembangkan karena kondisi siswa. Seorang pendidik harus terbiasa dengan program pembelajaran yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Kebiasaan pelatihan yang cenderung disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak-anak biasanya disebut sebagai Program Pendidikan Individual (IEP) atau Program Perencanaan Individual (PPI). Menurut UNESCO, “Kurikulum Program Pendidikan Individual (PPI) diperuntukkan bagi peserta didik yang memang tidak memungkinkan menggunakan kurikulum reguler maupun modifikasi. Tingkat kebutuhan pelayanan khususnya termasuk kompleks”. Di sini kurikulum adalah kurikulum reguler yang adalah kurikulum yang lengkap, kemudian kurikulum yang dimodifikasi yang merupakan kurikulum reguler

yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak.¹⁰⁶

Lynch mengklaim bahwa IEP adalah sistem rencana atau intervensi yang berfokus pada gaya kepribadian, kemampuan, serta anak dengan berkebutuhan berbeda. Hal tersebut berarti Ini menunjukkan bahwa PPI pada dasarnya adalah sistem pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan setiap orang dewasa (anak). Dua pandangan di atas mengandung pengertian bahwa program dikendalikan oleh siswa, bukan oleh program yang mengendalikan siswa.

Menurut Getskow dan Konczal mengungkapkan bahwa *“An IEP is an Individualized Educational Program that has been specially designed for any student eligible for special education. A child who has been identified as having special needs must be assessed to determine the nature and extent of his or needs in order to create*

¹⁰⁶ Unesco, *Learning the Treasure Within Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty First Century* (Perancis: Paris, 1998).

*the optimal learning environment.*¹⁰⁷ Di sana, IEP adalah Program Pendidikan Individual dan secara eksplisit dirancang untuk dipertimbangkan untuk perlakuan khusus untuk setiap murid. Untuk mengevaluasi tingkat dan tingkat kebutuhan, atau untuk membangun lingkungan belajar yang tepat, seorang bayi yang telah didiagnosis memiliki kebutuhan khusus harus dievaluasi. Menurut Snell dalam Ishartiwi dalam makalah Model Pendidikan Individual untuk Anak Berkebutuhan Khusus, pengenalan PPI sangat penting untuk ABK: 1) semua ABK memiliki kemampuan untuk belajar; 2) semua ABK membutuhkan keterampilan koping yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari di rumah dan di masyarakat 3) sekolah harus mempraktikkan keterampilan belajar praktis sesuai dengan kebutuhan individu.

Program Pembelajaran Individual/PPI disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran setiap anak dalam upaya mengembangkan

¹⁰⁷ Konczal and Getskow, *Kids With Special Needs Information and Activities to Promote Awareness and Understanding* (California: The Learning Work, 1996).

potensinya, menurut Getskow dan Konczal mengungkapkan bahwa “*Mandates a series of steps that must be taken before a child with special needs can receive services. The following steps and terminology are described and outlined for the adult unfamiliar with the process*”.¹⁰⁸

Kedua, mempersiapkan penilaian di mana konsultasi dengan orang tua diadakan dalam rencana evaluasi untuk memberikan alasan untuk pemeriksaan dan pemilihan tes yang benar dan siapa yang akan mengevaluasi anak itu. Langkah ketiga, penjelasan dan perjanjian di mana anak harus memiliki orang tua atau wali yang ditandatangani sebelum melanjutkan dengan pengujian dan pemberitahuan hak-hak orang tua. Yang keempat adalah penilaian siswa. Keempat, sesi staf yang dapat berisi informasi yang diberikan oleh pengasuh, mengenai keselamatan bayi, evaluasi, penelitian standar, atau penilaian organisasi lain. Keenam, persiapan IEP, yang pada saat ini menentukan kelayakan, tujuan dan tujuan IEP yang akan ditetapkan, menentukan lokasi dan fasilitas,

¹⁰⁸Konczal dan Getskow, *Kids With Special*, 21.

pandangan selama anak melanjutkan dalam rencana sekolah normal, tanggal di mana khusus pendidikan dimulai dan selesai, pemberitahuan tentang hak dan salinan kertas yang ditandatangani, memperjelas proses penilaian tahunan. Langkah ketujuh adalah memperkenalkan IEP di mana para guru dan orang tua mengevaluasi konsekuensi dan perubahan bagi para siswa. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali IEP, yang membahas transfer pembelajaran di antara siswa.

14. Modifikasi Pendidikan Inklusif

Tahapan penyusunan kurikulum modifikasi menurut pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur:

Tahap pertama, Kurikulum Standar Nasional: Kurikulum yang fleksibel bagi pendidikan inklusif dimaknai sebagai upaya melakukan modifikasi atau penyesuaian dari kurikulum Standar Nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Tahap kedua, identifikasi dan assesmen: Dalam penerimaan PDBK dilakukan proses identifikasi dan assesmen. Identifikasi merupakan kegiatan awal

sebelum melakukan proses assesmen. Hal yang harus diperhatikan pada proses identifikasi di antaranya kondisi fisik, kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi dan kondisi sosial dan emosional. Proses identifikasi dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, sekolah, dan tenaga profesional. Budiyanto mendefinisikan identifikasi “sebagai usaha menemukan anak berkebutuhan khusus dalam hal ini anak atau peserta didik yang mengalami kelainan dengan berbagai gejala yang menyertainya dengan memperhatikan kondisi fisik, kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi dan kondisi sosial dan emosional.”¹⁰⁹ Sementara assesmen merupakan proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran dan iklim sekolah. Maka bila dikaitkan dengan PDBK merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan informasi tentang PDBK untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang

¹⁰⁹ Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal* (Jakarta: Depdiknas, 2005), 11.

mendukung pelayanan bagi PDBK tersebut. Assesmen dapat dilakukan dalam bentuk formal, maupun non formal melalui wawancara, observasi/pengamatan, dan tes formal/nonformal. Assesmen dapat dilakukan oleh orang tua, guru kelas, GPK, dan melibatkan tenaga profesional yang terlibat langsung dengan PDBK.¹¹⁰ Hal ini didukung oleh pendapat Lerner dan Johns bahwa, *"A student for special education evaluation can come through several sources such as the parent, the teacher, others professional who have contact with student, or self referral by the student"*.¹¹¹

Sekolah inklusif memiliki banyak alasan untuk melakukan deteksi dan evaluasi ini, termasuk: (a) mengidentifikasi kebutuhan dan kepedulian sosial kepada siswa berkebutuhan khusus (ABK) dalam proses akademik; (B) menyediakan dasar untuk referensi profesional; (c) memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk mewujudkan tingkat dan bentuk kebutuhan khusus; (D) mempromosikan kesadaran proses pembelajaran.

¹¹⁰ Dinas Pendidikan, *Pedoman Teknis*, 18.

¹¹¹Lerner and Johns, *Learning Disabilities*, 56.

Ini sejalan dengan pendapat Lerner dan Johns, yang mengungkapkan bahwa proses identifikasi dan evaluasi memiliki beberapa tujuan, termasuk: (1) penyaringan (*screening*), yang bertujuan mendeteksi siswa yang membutuhkan layanan khusus dalam proses pembelajaran; (2) outsourcing atau rujukan, proses ini mengharuskan guru mencari bantuan dari guru lain (pihak lain) untuk mengamati PB. Temuan penilaian akan digunakan untuk mengevaluasi prioritas, tolok ukur, metode dasar dan tinjauan yang akan digunakan dalam PPI; dan (5) melacak hasil belajar siswa / mengukur pertumbuhan murid, yang sangat penting dalam memantau keberhasilan anak-anak. Beberapa hal yang dapat digunakan terus menerus dalam pemantauan, mulai penilaian formal, pengukuran informal dan prosedur pemantauan.

Negara telah merencanakan format kertas identitas sejak 2012. Ketika siswa baru terdaftar, format ini dapat digunakan sebagai cara mendefinisikan GDPK. Format kertas Pemerintah tentang pengakuan PDBK berfokus pada tanda dan perilaku klinis. Kebutuhan alat identifikasi PDBK dengan gangguan penglihatan, pendengaran, keterbelakangan mental,

cacat intelektual, anak-anak berbakat, pembelajaran lambat atau autisme.¹¹²

Tahap ketiga, Perencanaan Pembelajaran: Perencanaan pembelajaran tertuang dalam silabus dan RPP. Bentuk perencanaan pembelajaran bagi ABK tertuang dalam PPI (Program Pembelajaran Individual).¹¹³

Tahap keempat, Pelaksanaan Pembelajaran: Pada tahap ini proses belajar mengajar dibagi dalam dua kelas yakni kelas khusus dan kelas inklusif. Dalam proses pembelajaran di kelas inklusif dilakukan modifikasi secara fleksibel antara lain sebagai berikut:

- a. Waktu belajar diperpanjang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan di ruang sumber.
- b. Pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan di kelas khusus
- c. Penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran
- d. Penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu (misalkan dekat dengan guru)
- e. Pemanfaatan peserta didik reguler sebagai tutor sebaya dan lain-lain.

¹¹² Dinas Pendidikan, *Pedoman Teknis*, 51-56.

¹¹³ *Ibid.*, 24-25.

Tahap kelima, Penilaian Hasil Pembelajaran. Pada tahap ini ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu; (1) Dasar Penilaian Hasil Belajar Siswa, (2) Jenis, Waktu, dan Strategi Penilaian, (3) Sistem Kenaikan Kelas dan Kelulusan, (4) Sistem Pelaporan Hasil Belajar.

Sehingga dalam setting kelas inklusif tidak ada PDBK yang tinggal kelas, dikarenakan kurikulum bagi PDBK tersebut telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik PDBK.

a. Proses Belajar Mengajar

Lombardi menjelaskan banyak jenis pembelajaran yang akan membantu meningkatkan kinerja kelas inklusif. Template ini termasuk:¹¹⁴

- 1) Pengajaran langsung (*direct instruction*):
Penekanannya adalah pada penggunaan struktur ringan dan jadwal waktu kelas, efisiensi penggunaan semua sumber daya dan pemantauan ketat kemajuan.
- 2) Intervensi strategi (*strategy intervention*):
Penekanan ditempatkan pada keterampilan

¹¹⁴ Lombardi, *Responsible Inclusion of Students with Disabilities* (Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1994).

mengajar seperti: mendengarkan/*listening*, mencatat/*note*, pertanyaan sendiri/*self questioning*, pengujian lisan/pemantauan kesalahan/*error monitor*.

- 3) Tim asistensi-guru (*teachers assistance team*): Guru pendidikan khusus (GPK) bekerja sebagai sebuah tim, sering bertemu untuk mengatasi tantangan dan membantu anggotanya mengendalikan perilaku siswa dan kesulitan akademik.
- 4) Model guru sebagai konsultan (*consulting teacher model*): Guru khusus dilatih sebagai penasihat untuk memberikan saran dan bantuan kepada guru di kelas umum, juga mendidik spesialis untuk mendukung siswa kurang mampu yang ditugaskan di sekolah. Mereka melakukan tim pengajaran dengan guru kelas umum pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus terlepas dari apakah mereka tahu mereka memiliki hambatan atau tidak.

Hal senada juga dikemukakan oleh Loreman yakni terdapat beberapa model kolaborasi dalam kelas inklusif yaitu “Satu guru satu dukungan

(*one teacher, one support*), pangkalan/pos pembelajaran (*station teaching*), belajar secara parallel (*parallel teaching*), pembelajaran alternatif (*alternative teaching*), pembelajaran dengan tim (*team teaching*), dan Gargiulo menambah satu lagi, yaitu *one teacher one observe* (satu guru satu observasi).¹¹⁵

Semua orang terlibat dalam tantangan mempersiapkan siswa penyandang hambatan untuk kehidupan di masyarakat yang lebih terbuka. Akhirnya pendidikan anak berkebutuhan khusus benar-benar dirancang secara individual dengan mempertimbangkan kebutuhan inklusif, kebutuhan layanan khusus, dan kebutuhan dukungan lingkungan yang menunjukkan dukungan penuh terhadap ABK diperlukan bagi keberhasilan pendidikannya. Bila manusia dewasa dan mereka adalah sumber daya manusia yang berakal maka mereka akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah.

b. Penilaian Hasil Belajar

¹¹⁵ Loreman, *Inclusive School*, 86.

Keragaman karakteristik siswa di sekolah inklusif tidak diragukan lagi memberikan pintu bagi metode evaluasi hasil belajar yang sangat beragam. Dalam lingkungan kurikulum yang inklusif, penilaian komprehensif dan berkesinambungan hasil pembelajaran diarahkan untuk menilai hasil belajar siswa di kelas, mengambil tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kurikulum kelompok, dan memahami konsistensi pengajaran sekolah. Pembelajaran berkelanjutan melibatkan membuat asumsi konstan tentang apa yang dipelajari, dipahami, dan dapat dilakukan siswa. Kerangka kerja pengujian sekolah seharusnya serba guna dalam lingkungan pendidikan yang komprehensif. Kerangka kerja pengujian disesuaikan dengan semua keterampilan anak-anak untuk mereka yang berkebutuhan khusus.¹¹⁶

Evaluasi fleksibel yang dapat diperluas dalam dua jenis, masing-masing evaluasi non-tes hasil kuantitatif atau kualitatif (portofolio). Penilaian harus dilakukan dalam upaya memperkenalkan

¹¹⁶ Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan*, 121.

kurikulum yang menyambut semua siswa, dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan variasi. Keefektifan atau kegagalan rencana kurikulum dapat ditentukan dengan peninjauan, dalam hal ini pengujian yang dilakukan mengarah pada program yang jelas. Hal ini selaras dengan pendapat Budimansyah bahwa “Penilaian yang baik hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual (*individual differences*).”¹¹⁷

Penilaian adalah persepsi dan kinerja intelektual dari tes penilaian. Data hasil belajar yang diperoleh melalui pengukuran dan evaluasi pendidikan adalah informasi yang sangat berguna sebagai umpan balik untuk implementasi strategi proses belajar mengajar. Proses evaluasi saat ini dimulai dengan partisipasi anak-anak secara administratif di sekolah-sekolah di kelas yang menunjukkan apresiasi terhadap berbagai karakteristik siswa. Temuan-temuan dari proses evaluasi kemudian dimasukkan dalam desain dan penerapan kurikulum sebagai bahan referensi,

¹¹⁷ Budimansyah, *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio* (Bandung: Gresindo, 2002), 113.

memastikan bahwa kebutuhan akademik setiap siswa dapat diakomodasi oleh berbagai masalah yang ditemukan dalam kurikulum. Kurikulum adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Siswa diberi kemampuan untuk berhasil dalam kinerja sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat belajar secara optimal. Hal-hal yang perlu diingat guru ketika melakukan latihan penilaian penilaian adalah:

- 1) Memandang evaluasi sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran.
- 2) Membangun pendekatan pembelajaran yang mempromosikan dan meningkatkan proses evaluasi sebagai praktik reflektif (refleksi diri dan pengalaman belajar).
- 3) Melakukan pendekatan evaluasi khusus dalam sistem akademik yang menyediakan berbagai bentuk pengetahuan tentang hasil akademik untuk siswa.
- 4) Agar sesuai dengan kebutuhan khusus siswa.

- 5) Kembangkan sistem perekaman yang menawarkan berbagai cara untuk mengamati pembelajaran siswa.
- 6) Menggunakan pengujian untuk mengumpulkan informasi untuk menyetujui standar kinerja siswa.¹¹⁸

Variasi dalam kualifikasi tidak dimaksudkan untuk memberi guru hak untuk mengelola formulir lain dalam ujian secara sepihak. Bertentangan dengan variasi evaluasi, dalam mengambil keputusan, guru harus lebih berpengetahuan dan akuntabel. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan (*continuous evaluation*) untuk mendorong siswa belajar dan merefleksikan kemauan siswa untuk melakukan pembelajaran dan hasil yang diterima. Ini berarti bahwa ada proses evaluasi berkelanjutan yang tidak berakhir dan didasarkan pada tes akhir, tetapi semua prosedur dievaluasi dengan cermat, sehingga guru

¹¹⁸ Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan belajar siswa dari awal hingga selesai.¹¹⁹

Guru menyiapkan buku evaluasi individual yang mencakup deskripsi semua hasil belajar siswa (hasil tes, hasil tugas individu, hasil realistik, hasil pekerjaan rumah, dll.) Dilaporkan dan disusun secara konsisten agar setiap siswa mendapatkan perhatian yang sama tetapi ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka.¹²⁰ Penilaian tidak dimaksudkan untuk menilai siswa tetapi untuk mengevaluasi kualitas peluang belajar bagi siswa. Untuk tujuan tersebut, fungsi dilakukan secara komprehensif dan konsisten antara metode dan hasil penilaian. Posisi guru sebagai penilai kritis menggambarkan bagaimana siswa berpikir, bagaimana siswa menyesuaikan apa yang mereka ketahui dengan situasi yang berbeda, dan bagaimana pembelajaran siswa dalam lingkungan belajar yang berbeda berkembang.

¹¹⁹Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, *Modul Bimbingan Karir Pendidikan Inklusif* (Jakarta: PKLK, 2016), 61.

¹²⁰Sunanto, *Pendidikan yang Terbuka bagi Semua*, 87.

Pemeriksaan federal adalah wajib untuk anak-anak biasa, sementara anak-anak berkebutuhan khusus tidak diharuskan untuk hadir. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kecerdasan yang berbeda, ada yang di bawah rata-rata, misalnya keterbelakangan mental, peserta didik lambat, tetapi ada juga di atas rata-rata. Anak-anak dengan kebutuhan khusus hanya dapat menerima Sertifikat Kelulusan setiap enam tahun setelah mereka lulus dari sekolah dan melanjutkan ke tahap selanjutnya dari pendidikan inklusif. Anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak ada hubungannya dengan Tes Standar Kelulusan tahun sekolah. Pendidik tidak menekankan kekurangan atau kegagalan siswa, melainkan membahas apa yang telah dipelajari siswa dan memutuskan apakah kita dapat membantu mereka belajar lebih baik. Dengan diikuti penilaian yang akurat dan berkelanjutan, instruktur akan menentukan apa yang telah dicapai dan dicapai siswa serta banyak penjelasan mengapa siswa tidak terinspirasi untuk belajar dan menjawab pertanyaan tes. Guru menyesuaikan persiapan dan instruksi sesuai dengan tahap pertumbuhan pembelajaran

siswa, memastikan bahwa semua siswa diberi kesempatan untuk belajar dan unggul.

15. Membentuk Sekolah Inklusif

- a. Kesiapan Lembaga dalam Mempersiapkan menjadi Lembaga Pendidikan Inklusif

Kemampuan sekolah untuk menawarkan program pendidikan komprehensif adalah rahasia untuk memasukkan siswa yang kurang beruntung secara lebih baik dan berhasil dengan semua pemangku kepentingan. Schultz telah mendaftar 10 bidang kesiapan besar yang merupakan prasyarat untuk kampus yang lebih ramah dan lebih egaliter, termasuk:¹²¹

- 1) Sikap (*attitudes*): Guru dan manajer akan setuju bahwa peningkatan integrasi dapat mengarah pada peningkatan pengajaran dan pembelajaran untuk semua orang.

¹²¹Schultz, *A History of Mental Retardation* (Baltimore: Paul H. Brookes, 1983), 151.

- 2) Persahabatan (*relationship*): Kerjasama antara siswa dan interaksi dengan atau tanpa hambatan dapat dilihat sebagai praktik yang dapat diterima.
- 3) Dukungan bagi siswa (*support for students*): Agar efektif, siswa tertentu di kelas inklusif dapat memiliki layanan atau personel lain yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dukungan.
- 4) Dukungan untuk guru (*support for teachers*): Guru akan memiliki program persiapan untuk mengatasi berbagai siswa yang beragam budaya.
- 5) Kepemimpinan administratif (*administrative leadership*): Kepala sekolah dan staf lain akan tertarik untuk menawarkan dukungan dan bimbingan menuju ruang kelas yang lebih berkelanjutan.
- 6) Kurikulum (*curriculum*): Program harus cukup fleksibel untuk mendorong setiap murid mencapai yang terbaik.
- 7) Penilaian (*assessment*): Tujuan pencapaian dan keberhasilan harus diberikan evaluasi yang memberikan citra akhir setiap siswa.
- 8) Program dan evaluasi staf (*program and staff evaluation*): Untuk memiliki suasana yang adil dan

aman bagi siswa, kerangka kerja harus ditempatkan untuk menentukan kinerja sekolah secara keseluruhan.

9) Keterlibatan orang tua (*parental involvement*):

Orang tua siswa dengan atau tanpa hambatan perlu mempertimbangkan niat setiap siswa untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah.

10) Keterlibatan masyarakat (*community involvement*):

Publik ingin aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi dan inklusi siswa penyandang cacat dalam kehidupan sekolah melalui media dan publikasi sekolah.¹²² Mereka harus mempromosikan toleransi ini dan memperluas inklusi dalam budaya itu sendiri.

Sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif dengan dukungan semua pihak berkepentinganlah yang diharapkan dapat diimplementasikan pada lembaga pendidikan reguler yang mengakomodasi PDBK.

b. Langkah-langkah Strategis Implementasi Pendidikan Inklusif

¹²² Ibid.

Agar inklusif dapat memberikan dampak positif maka harus diimplementasikan dengan tepat serta mampu dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam perencanaan harus melibatkan semua anggota komunitas pendidikan. Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan kelas yang inklusif, harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus individual dalam sekolah atau masyarakat. Wisnewski dan Alper mengemukakan pendapatnya:¹²³

- 1) Pengembangan jaringan kerja (*develop a network*): Guru, orang tua dan anggota kelompok lainnya perlu membangun jaringan kerja yang kohesif yang dipersiapkan dengan kepemimpinan dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Peran kunci dari jaringan ini adalah untuk menguji sikap terhadap inklusi oleh siswa, orang tua dan populasi.
- 2) Sumber penilaian sekolah dan masyarakat (*asses school and community resources*): Pada tahap ini, anggota jaringan mengevaluasi sumber daya sekolah yang sesuai untuk pengiriman layanan IDEA (*Individual with Disabilities Education Act*)

¹²³ Smith, *Pendidikan Inklusif*, 398.

kepada siswa. Anggota juga mempelajari kebijakan dan prosedur sekolah negeri terkait dengan siswa berkebutuhan khusus. Ada analisis dari beberapa aturan administratif yang mempengaruhi layanan yang ditawarkan kepada siswa.

- 3) Tinjauan terhadap penerapan strategi inklusif (*conduct an inclusion strategi review*): Pada fase ini para peserta jaringan melihat solusi yang akan membuat implementasi di sekolah dan ruang kelas lebih inklusif. Misalnya, usulan pertemanan di antara siswa yang dihambat, adopsi penggunaan teknologi, bentuk baru pengelompokan belajar siswa, penggunaan tutorial teman sebaya dan lainnya.
- 4) Strategi-strategi penerapan inklusif (*implement inclusion strategies*): Pada tahap ini para peserta jaringan mengadopsi metode inklusi yang paling cocok dan berhasil.
- 5) Pengembangan umpan balik dan sistem evaluasi (*develop a feedback and renewal system*): Tahap ini dicapai ketika mengumpulkan data dan mengevaluasi inklusivitas di antara anggota

jaringan. Perubahan dan inovasi adalah bagian dari sistem kolaboratif holistik yang lebih besar, berdasarkan penilaian berkelanjutan.¹²⁴

Hal senada diungkapkan Loreman bahwa ada tujuh pilar pendukung untuk menjadikan sekolah inklusif yang efektif,¹²⁵ yaitu: (1) *Positive attitudes*/ perilaku yang positif (2) *Policy and leadership*/kebijakan dan kepemimpinan (3) *School & classroom proceses*/sekolah dan proses di dalam kelas (4) *Curriculum and paedagogi*/kurikulum dan tenaga pendidik (5) *the community*/masyarakat (6) *Meaningful reflection*/saling memahami (7) *Training and resources*/pelatihan dan sumber pendukung.

c. Inklusif Membentuk Masyarakat yang Lebih Peduli

Keluarga menjadi bagian kehidupan masyarakat kecil di sekitar *disable children* (ABK) yang paling berpengaruh terhadap kemandirian kehidupan nanti ketika mereka dewasa. Sekolah dan masyarakat merupakan trilogi pendidikan yang ikut

¹²⁴ Ibid., 399.

¹²⁵ Loreman, "Seven Pillars of Support for Inclusive School: Moving from 'Why?' To 'How?,'" *International Journal of Whole Schooling* 3, no. 2 (2007): 33.

bertanggung jawab terhadap pendidikan moral yang menghargai keanekaragaman, dan mampu memberikan dukungan yang positif bagi mereka yang berbeda. Karena keanekaragaman Indonesia merupakan keunikan, bukan hal yang justru membedakan.

Dalam beberapa penelitian pendidikan inklusif mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap siswa ABK dan siswa normal, bagi pendidik, dan juga terhadap semua masyarakat. Berikut pemaparan kontribusi pendidikan inklusi yang telah dirangkum oleh *Office of Special Education Program* dalam Smith Sekolah Inklusif :

- 1) Inklusif memberi kontribusi positif terhadap siswa ABK dan siswa normal, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sharp, York, dan Knight tidak menemukan dampak negatif pada siswa lain yang berintegrasi dengan ABK. Namun inklusifitas memberikan perubahan yang positif, di antaranya:
 - a) Hubungan yang terjalin dengan siswa ABK menghasilkan sikap yang lebih positif, meningkatkan respon terhadap kebutuhan

- orang lain, serta meningkatkan penghargaan atas perbedaan.
- b) Siswa ABK di tempat inklusif mendapatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang berada di tempat terpisah.
 - c) Kemajuan akademik siswa yang tidak berkelainan (*nondisabled*) tidak menjadi lambat dengan adanya siswa ABK.
 - d) Siswa normal mampu menciptakan persahabatan yang tulus dengan ABK.
 - e) Tumbuh sikap kesadaran sosial dan perkembangan aspek diri.¹²⁶
- 2) Pendidikan inklusif memberikan kontribusi positif terhadap pendidik. Penelitian yang dilakukan oleh Alexander dan Strain dalam buku *Sekolah Inklusif* memaparkan bahwa “guru memiliki sikap yang negatif terhadap konsep inklusif. Sebagian mereka meragukan apakah siswa berkebutuhan khusus yang serius benar-benar mendapatkan keuntungan dari pendidikan inklusif tersebut.”¹²⁷ Namun penelitian yang

¹²⁶ Smith, *Sekolah Inklusif*, 422.

¹²⁷ Ibid., 427.

dilakukan oleh Rainfort dalam buku yang sama memaparkan bahwa apabila terdapat sistem yang mendukung agar pendidik mampu menciptakan keinklusan di dalam kelas, maka terdapat kontribusi yang positif di antaranya:

- a) Mereka belajar banyak mengenai kelainan dan hambatan, semakin mereka memperhatikan interaksi ABK, anak-anak tersebut mulai memberi pelajaran berharga bagi orang dewasa.
- b) Terdapat fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif
- c) Memperkuat komitmen mereka untuk membantu setiap anak agar berhasil (*success for all*).

Dalam keadaan terbaik dan paling penting inklusif adalah mengubah perspektif pemikiran tentang ABK. Ketika anak-anak yang tumbuh dengan cara menerima terhadap semua orang, diharapkan menjadi anggota masyarakat yang konstruktif dan aktif. Lingkungan kerja yang ditandai dengan kerjasama lebih besar di antara sesama akan lebih berkembang. Di dalam sekolah-

sekolah inklusif ada satu tujuan ke arah di mana guru, siswa, orang tua dan masyarakat bekerjasama bahkan dengan komitmen yang besar. Di masa mendatang yang dipenuhi dengan tantangan-tantangan, tak seorang anak pun dibiarkan luput dari perhatian dan bimbingan yang diberikan di dalam lembaga pendidikan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini mengikuti model analisis yang mengikuti pendekatan kualitatif, suatu bentuk studi kasus dengan sifat multi-situs yang bertujuan mengidentifikasi kesamaan antara satu situs dan lainnya. Tujuan dari karya ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena untuk mengembangkan hipotesis. Idanya adalah tentang mengubah kurikulum komprehensif Panti Asuhan Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo. Karena itu karya ini menggunakan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki kebiasaan perilaku psikologis dan emosional yang secara langsung dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal dari dunia alami yang dihadapi oleh peserta utama, yaitu, administrator, siswa, pengasuh di dua lokasi pengujian, yaitu di Panti Asuhan dan Aisyah Ponorogo Aisyiyah. Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo. Langkah-langkah yang diambil dalam

analisis ini adalah sebagai berikut: (1) mengumpulkan data di situs pertama, yaitu di Panti Asuhan Aisyiyah; (2) mengevaluasi situs kedua, Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih posisi di Panti Asuhan Aisyiyah Panti Asuhan dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo karena pemilihan posisi dan komitmen dipandu oleh berbagai faktor yang berfokus pada keunikan, keindahan, keunikan, dan sejalan dengan subjek penelitian ini. Adapun beberapa alasan substansial, mengapa kedua sekolah melakukan penelitian ini adalah penjelasan pertama untuk posisi penelitian dan alasan kedua, alasan konkret untuk laporan tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti berfungsi sebagai alat penting dalam upaya mengumpulkan data di lapangan. Partisipasi dan komitmen peneliti tidak dapat digantikan oleh perangkat lain. Selain itu, pengetahuan tambahan dapat dikumpulkan dari informan berdasarkan wawasan, latar belakang, keterampilan dan peran mereka dengan partisipasi aktif di

lapangan. Investigator harus peka, dapat beradaptasi, menekankan keutuhan, memfokuskan diri pada perluasan kesadaran, dan memanfaatkan peluang untuk menjelaskan dan menyimpulkan.

Para peneliti langsung masuk ke lapangan ketika para peneliti pertama kali mengkonfirmasi dan mensurvei Panti Asuhan Aisyiyah dan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo. sebelum menyusun proposal. Peneliti menggunakan strategi penyaringan yang disengaja dalam proses pemilihan informan, di mana peneliti memilih individu-individu yang dianggap secara khusus mengetahui pertanyaan yang sedang dianalisis. Keterlibatan para cendekiawan di daerah tersebut untuk mengambil informasi menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

1. Dalam situasi ini, peneliti harus mencari sumber primer untuk mengumpulkan pengetahuan tentang siapa yang idealnya memenuhi syarat untuk diwawancarai dalam hal mengubah sistem pendidikan yang komprehensif di dua lembaga pendidikan di Kabupaten Ponorogo.
2. Pemilihan sumber yang mempelajari dan menghargai peningkatan dalam program pendidikan komprehensif

lembaga publik. Informan adalah kepala sekolah, penjaga dan guru dalam situasi ini.

3. Menghentikan penemuan informan baru jika informasi yang dikumpulkan sebelumnya tidak muncul lagi. Kemudian penelitian dianggap selesai sampai item tambahan yang relevan dengan masalah yang sedang ditinjau ditemukan.

D. Data dan Sumber Data

Bukti studi ini berarti pengetahuan atau fakta yang dapat dievaluasi untuk menjelaskan suatu fenomena atau untuk mendukung hipotesis, yang dikumpulkan dengan observasi atau kerja lapangan. Informasi, dalam bentuk penjelasan, disediakan dalam analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam analisis ini sejalan dengan penekanan penelitian, yang terkait dengan perubahan dan dampaknya dari kurikulum pendidikan inklusif.

Dalam analisis ini tipe data dapat dibagi menjadi dua, yaitu: data primer dan sekunder. Bukti utama dikumpulkan dalam konteks kata-kata atau tindakan verbal dari subjek (*informan*) yang mengarah pada perubahan

program universal dalam pendidikan. Data sekunder berasal dari catatan, foto, dan objek serta dapat digunakan sebagai pelengkap pengetahuan primer. Data sekunder berisi, terutama dalam bentuk teks, dokumen, gambar atau foto yang berkaitan dengan metode atau peristiwa yang relevan dengan perubahan kurikulum komprehensif dalam pendidikan.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menyeleksi informan yang benar-benar mengetahui informasi dan tantangan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data. Sehingga peneliti akan dapat menentukan koleksi sesuai dengan tujuan studi. Pengambilan sampel yang tercantum di sini bukan mewakili populasi tetapi berfokus pada topik yang muncul di wilayah tersebut.

Peneliti mencari informan representatif menggunakan parameter termasuk: (1) akulturasi penuh, kehadiran aktif informan dalam studi untuk membuatnya lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Dalam kerangka studi informan, informan dipilih berdasarkan partisipasi informan yang melakukan upaya untuk

mengubah kurikulum dalam pendidikan inklusif, (2) keterlibatan langsung, yang menyiratkan bahwa informan aktif secara khusus, menggunakan informasinya untuk memengaruhi mereka. tindakan, memeriksa hal-hal yang mereka pelajari tentang peningkatan kurikulum inklusif, (3) suasana budaya yang tidak diketahui. Ini juga berguna untuk memilih sumber yang dapat memiliki pemahaman lengkap tentang penyesuaian program holistik untuk studi dan penjelasan. (4) Waktu yang cukup, yang berarti memilih seorang informan yang memiliki cukup waktu untuk diwawancarai (5) informan terpilih non-analitis yang tidak melakukan investigasi terhadap konteks atau pentingnya peristiwa dan perilaku. Ini juga berguna untuk memilih sumber yang dapat memiliki pemahaman lengkap tentang penyesuaian program holistik untuk studi dan penjelasan. Adapun yang harus dimasukkan dalam pengertian ini sebagai informan atau subjek ujian adalah kepala sekolah, wali dan siswa, sebagai pelaksana penyesuaian kurikulum universal dalam pendidikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar dapat menghasilkan produk yang sangat andal. Rincian yang

disinggung di sini yaitu semua hal yang relevan dengan penekanan studi, yaitu perubahan dan konsekuensi dari program pendidikan komprehensif. Untuk penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, termasuk wawancara, evaluasi mata pelajaran, dan perekaman. Peneliti sendiri adalah instrumen kunci dalam analisis ini, dibantu secara tidak sengaja oleh unit rekaman seluler, kamera, instruksi wawancara dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Ketiga metode ini harus dieksplorasi secara terperinci, termasuk wawancara mendalam, penilaian audiens, dan analisis pelaporan.

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengekstraksi lebih banyak informasi dari informan. Penelitian ini menggunakan kombinasi dua pendekatan untuk wawancara, yaitu wawancara terorganisir dan wawancara tidak terorganisir. Wawancara terorganisir dilakukan dengan menulis pertanyaan penelitian. Draf ini hanya digunakan sebagai referensi atau pedoman ketika melakukan wawancara sehingga peneliti tetap dalam konteks investigasi dan tidak keluar dari isi analisis, sedangkan

wawancara tidak terorganisir digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam tanpa ditetapkan secara ketat. mungkin dengan urutan di mana daftar pertanyaan dirancang, wawancara dilakukan sealami mungkin. Untuk analisis ini informan meliputi: kepala sekolah, pengasuh dan siswa. Penjelasan yang dipilih oleh peneliti adalah bahwa para peneliti berpikir mereka memahami hal-hal spesifik tentang mengubah program sekolah komprehensif, dan menyajikan rincian yang dapat dipercaya akan lebih simbolis.

2. Observasi

Dalam studi ini, peneliti secara khusus tertarik pada perubahan kurikulum inklusif dalam pendidikan. Hal-hal yang ditemukan adalah:

- a. Modifikasi kurikulum pendidikan inklusif.
- b. Implikasi kurikulum pendidikan inklusif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memvalidasi bukti tentang kurikulum inklusif untuk sekolah. Peserta dalam melakukan penelitian tidak hanya mengikuti pola pengamatan terorganisir, termasuk mengamati perilaku dengan mendokumentasikan atau mendokumentasikan kondisi

sesuai dengan penekanan studi, peserta sering melakukan proses pengamatan tanpa terikat pada daftar yang diberikan, dan peserta belum dilatih, tetapi dipelajari di lingkungan alami.

2. Dokumentasi

Para peneliti mengumpulkan informasi termasuk profil sekolah (sejarah), struktur organisasi, data instruktur, fasilitas, jadwal sekolah, kurikulum pendidikan inklusif, praktik guru, praktik, dan perincian lainnya yang mencerminkan peningkatan pada kurikulum pendidikan inklusif. Para peneliti telah menyusun foto-dokumen acara kerja yang dilakukan para peneliti di Panti Asuhan Aisyiyah maupun Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo.

Atas dasar definisi di atas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan analisis sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan bukti tentang gagasan penyesuaian program sekolah inklusif dengan wawancara mendalam, penilaian, dokumentasi.

- b. Untuk mendapatkan informasi tentang konsekuensi mengubah kurikulum komprehensif dengan teknik konsultasi, pencatatan dan penilaian.

Peneliti harus dapat meninjau laporan dan dokumentasi mengenai peningkatan kurikulum komprehensif pada Panti Asuhan Aisyiyah maupun Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo, sehingga hasil penelitian dibuat yang sejalan dengan penekanan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna untuk pencarian terstruktur dan kompilasi transkrip wawancara, observasi lokasi, dan bahan-bahan lain yang diperoleh oleh peneliti untuk meningkatkan interpretasi mereka sendiri atas bahan-bahan ini dan untuk memungkinkan para peneliti untuk mengomunikasikan apa yang mereka temukan kepada orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kegiatan pemrosesan bukti, pengorganisasian, pembagian menjadi unit-unit yang dapat dikontrol, disintesis, pencocokan pola, mengidentifikasi apa yang penting, dan apa yang peneliti teliti dan pilih untuk dilaporkan secara sistematis. Arsitektur penelitian ini

adalah multi-situs, dengan demikian mengikuti panduan Robert K Yin dalam bentuk pengumpulan dan analisis data. Menurut Yin, arsitektur studi multi-situs dilakukan dalam dua langkah dalam analisis data, yaitu analisis data situs individu, analisis data lintas situs.¹²⁸

1. Analisis Data Situs Individu

Dilakukan pada objek masing-masing, yaitu Panti Asuhan ‘Aisyiyah maupun Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo. Dalam analisis, mengartikan data dalam konteks istilah sehingga interpretasi tercapai, dan analisis dilakukan sesuai dengan proses pengumpulan data, bahkan setelah data diekstraksi. Peneliti menggunakan analisis data melalui menanggapi Miles dan Huberman dengan tiga operasi paralel, yaitu: (a) reduksi data melalui pengklasifikasian, pengendalian, penghapusan data yang berlebihan dan pengaturan, (b) penyajian data (tampilan data), yaitu mengidentifikasi pola hubungan yang relevan dan menyajikan potensi menggambar kesimpulan, dan (c) menggambar kesimpulan / verifikasi (menyimpulkan).

¹²⁸ Robert K Yin, *Case Study Research Design and Methods* (Beverly-Hills: Sage Publication, 1984), 52-53.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode penelitian yang mempertajam, mengklasifikasikan, memimpin, membuang secara berlebihan, dan mengatur data sedemikian rupa untuk mencapai kesimpulan dan bukti akhir. Pengurangan data sering didefinisikan sebagai proses penemuan, yang berfokus pada penyederhanaan, abstrak dan konversi data mentah yang timbul dari dokumen tertulis di lapangan. Pengurangan data terjadi dalam penelitian, lama ketika data akhirnya dikumpulkan bahkan memprediksi kehadiran pengurangan data sebagai menentukan struktur konseptual, bidang penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data diputuskan. Ada langkah pengurangan, yang berlanjut setelah proses pengumpulan data (meringkas, mengkode, melacak pola, membangun cluster, menulis memo). Siklus ini berlangsung sampai kompilasi data lapangan ditunda, bahkan pada akhir perencanaan survei, sampai terkoordinasi secara penuh.

Langkah selanjutnya adalah membuat skema pengkodean, semua data yang dituangkan ke

dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat deskripsi komunikasi tergantung pada penekanan studi. Setiap topik pelaporan diberi label untuk mengidentifikasi topik. Kode-kode ini digunakan untuk mengatur unit data, yaitu bit kalimat yang diambil dari transkrip sesuai dengan urutan pernyataan dengan sistem.

b. Penyajian Data

Tujuan penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk menentukan pola tertentu dan memberikan dasar bagi kesimpulan yang akan dibuat dan tindakan yang diambil. Penyajian data dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan konteks data yang dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis, dari informasi yang sederhana namun terbatas hingga yang kompleks. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata, kalimat, atau paragraf. Penyajian data yang paling banyak digunakan pada penelitian kualitatif sebelumnya adalah dalam bentuk teks naratif. Data disediakan dalam matriks, peta, jaringan, dan grafik dalam metode penelitian ini. Praktik analitis adalah merencanakan sederetan kolom untuk data kualitatif,

serta untuk merancang jenis dan sumber data yang akan dimasukkan ke dalam kotak matriks.

c. Penarikan Kesimpulan

Operasi analitik tahap ketiga dengan menarik kesimpulan dan pengujian. Analisis dilakukan sebelum dan sesudah data terkumpul untuk menarik sebuah hasil, untuk mengidentifikasi variasi pada peristiwa yang berulang. Peneliti telah berusaha menemukan signifikansi atau interpretasi simbol setelah pengumpulan data, memperhatikan keteraturan pola, penjelasan, dan aliran sebab akibat yang ada. Kesimpulan diambil dari operasi ini dan masih tersedia, umum dan kemudian pergi ke keterangan atau informasi. Diperkirakan bahwa hasil pasti akan diambil setelah pengumpulan data selesai.

2. Analisis Data Lintas Situs

Analisis data lintas situs dimaksudkan sebagai metode untuk mengevaluasi hasil yang dikumpulkan dari dan lokasi, serta mekanisme agregasi antara peristiwa. Hasil yang dikumpulkan dari Panti Asuhan Aisyiyah, kategori dan pola yang terorganisir, awalnya ditafsirkan secara konseptual secara induktif, dan

penafsiran tekstual disusun menjadi proposisi tertentu yang kemudian dibentuk menjadi teori konkret I.

Proposisi dan hipotesis substansial dan teori empiris II (temuan Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo). Koneksi antara dua lokasi ini dikenal sebagai penemuan sementara. Penelitian paralel dilakukan pada tahap akhir untuk menciptakan kembali secara sistematis dan menetapkan definisi situs I, situs II. Selain itu, studi lintas situs dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sama antara situs I dan II.

Analisis akhir ini bertujuan untuk membangun formulasi terstruktur yang berfokus pada temuan pemrosesan data dan interpretasi naratif abstrak dalam bentuk proposisi lintas situs yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk penciptaan hasil teori empiris. Langkah-langkah yang diambil dalam studi lintas situs ini meliputi: (a) penggunaan pendekatan induktif metodologis dengan membandingkan dan mengintegrasikan pengamatan metodologis dari setiap situs. (B) temuan digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan klaim logis atau proposal lintas situs. (C) menentukan kesesuaian suatu rencana dengan

informasi yang relevan. (D) membangun kembali proposal sesuai dengan rincian masing-masing lokasi, dan (e) ulangi siklus ini pada titik saturasi, jika diperlukan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengujian keaslian data didasarkan pada standar untuk memastikan data yang dikumpulkan dengan pengujian aman. Validitas data dalam analisis kualitatif merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah kepercayaan terhadap bukti.

Peneliti menggunakan: *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasiabilitas*. Persyaratan tersebut digunakan sebagaimana dinyatakan dalam analisis berikut:

1. Kredibilitas

Ini dicapai dengan teknik: pertama, perluasan keterlibatan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pada data yang dikumpulkan. Selama periode waktu itu untuk memahami dan memahami anomali yang timbul di seluruh dua fasilitas pendidikan yang dikenal sebagai lokasi studi. Oleh

karena itu para peneliti dapat mengamati anomali yang terjadi sampai tingkat yang paling penuh dan paling dalam.

Kedua, triangulasi untuk memastikan obyektivitas dalam interpretasi dan penerimaan informasi, sehingga temuan penelitian lebih tidak bias, disertai dengan pemeriksaan silang sehingga hasil analisis ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini triangulasi ganda digunakan oleh peneliti untuk membantu dan menerima validasi hasil, yaitu:

a. Triangulasi sumber

Pemeriksaan silang dari bukti yang dikumpulkan dari laporan dan pelaporan wawancara untuk yang diterima. Selain itu, verifikasi sering dilakukan di antara waktu, yang berarti untuk menanyakan kembali pertanyaan yang identik di berbagai kesempatan dengan sumber yang sama untuk memutuskan apakah tanggapan atau rincian yang diberikan adalah sama atau tidak seperti sebelumnya. Studi ini melakukan operasi triangulasi ini dengan konfirmasi ulang ke sumbernya. Peneliti

melakukan triangulasi referensi selama proses belajar dengan mewawancarai instruktur, wali dan siswa. Ini untuk menguji validitas data, sehingga Anda dapat mempercayai dan memverifikasi data. Selain itu, dengan mempelajari latar belakang, peneliti sering mencari dan meminta catatan atau file sekolah. Peneliti juga meminta sumber permintaan yang sama atas dasar lain untuk menentukan apakah data itu sama dengan yang dikirim sebelumnya, agar data yang dikumpulkan dipastikan terdilusi.

b. Triangulasi Metode

Peneliti menggunakan pendekatan ganda dalam memperoleh kesamaan data. Peneliti melakukannya sebab belum ada pendekatan khusus yang dapat membantu mengumpulkan hasil seperti itu. Untuk setiap pendekatan memiliki dimensi lain dari kebenaran ilmiah. Dengan cara ini, selain memiliki bukti yang valid, para peneliti melakukan perjalanan untuk memahami keakuratan atau bahasa informan juga.

Ketiga, yang akan dilakukan (*peer debriefing*) ini adalah dengan melibatkan seseorang untuk membahas temuan dan prosedur analisis yang telah dilakukan. Untuk tujuan ini peneliti harus menempatkan pengulas sebagai pendamping percakapan selain saran rutin selama masa studi. Selain itu, para peneliti telah menyelenggarakan latihan dialog di setiap lokasi pengujian dengan pengawas sekolah, orang tua, dan siswa. Sering membantu untuk mendiskusikan kembali pengamatan dan kesimpulan observasi yang telah diselesaikan.

Keempat, menulis laporan tentang hasil pengujian untuk memastikan kesesuaiannya dengan para korban dari fenomena yang diselidiki dengan metode pengujian, dengan meminta sumber dalam wawancaranya untuk mengklarifikasi bahwa catatan data tepat pada akhir wawancara, setiap kesimpulan dari operasi lapangan, ringkasan hasil penelitian. Dan para kritikus adalah mata-mata yang terdiri dari administrator sekolah, orang tua dan siswa.

2. Transferabilitas

Dalam analisis kualitatif, transferabilitas atau kenakalan dapat dicapai melalui definisi yang rinci. Sepanjang akhir ini, peneliti bertujuan seluruh komentar mendalam tentang temuan analisis. Gambaran umum dari penelitian ini diperlukan untuk dapat menjelaskan dengan jelas segala sesuatu yang diinginkan pembaca sehingga pembaca dapat menghargai temuan yang diperoleh. Wahyu itu sendiri bukan merupakan bagian dari penjelasan menyeluruh tetapi definisi yang diuraikan secara mendalam dengan akuntabilitas lengkap berdasarkan peristiwa aktual.

3. Dependabilitas

Kriteria ini diperlukan dalam melindungi terhadap risiko kesalahan dalam inferensi dan analisis bukti, sehingga hasilnya dapat dijelaskan secara statistik. Kemungkinan kesalahan ini sering terjadi karena manusia dijadikan instrumen utama oleh para peneliti. Konsekuensinya seorang konsultan diperlukan untuk penelitian ini.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau konfirmasi penting dalam menentukan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan atau tidak, tergantung pada persetujuan seseorang dengan banyak individu, pandangan, pendapat, dan temuan. Ketika dua atau lebih orang memutuskan itu tidak bias, tetapi bukti adalah kuncinya. Tentukan akurasi penelitian yang dilakukan dalam analisis ini dengan memeriksa hasilnya dengan informan atau pakar. Penelitian semacam itu dilakukan bersama-sama dengan evaluasi ketergantungan. Perbedaannya adalah jika tujuan reliabilitas adalah untuk menentukan prosedur yang dilakukan selama analisis, maka jaminan mengevaluasi validitas temuan tes, hubungan antara bukti, detail dan kesimpulan seperti yang dijelaskan dalam laporan dan didukung oleh konten penyerta.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Peneliti menggunakan tiga tingkat analisis, yaitu.: (1) studi persiapan orientasi, (2) studi eksplorasi umum, (3) studi eksplorasi terfokus.

Pertama, dengan menyusun rencana, tahap studi persiapan atau tes orientasi, dan kemudian mencari layanan dukungan yang sesuai. Penentuan tujuan difokuskan pada: a) masalah luas, yaitu modifikasi kurikulum inklusif, b) analisis literatur terkait, c) orientasi ke banyak komunitas pendidikan Islam dan pembentukan objek studi, yaitu Panti Asuhan Aisyiyah atau Sekolah Dasar *National Immersion Primary School* Ponorogo) berdiskusi dengan teman sebaya.

Kedua, fase percobaan eksplorasi umum, yaitu: (a) memberi pengarahan, mempertanyakan dan mendapatkan persetujuan dari otoritas yang sesuai; (B) temuan tentatif pada beberapa topik untuk menilai pemilihan topik lebih lanjut; (c) tinjauan pustaka dan analisis redefinisi penekanan; (d) lokakarya terbatas dan konsultasi terkait rekan kerja untuk mendapatkan masukan; (e) melanjutkan kolaborasi dengan reveiwer.

Ketiga, proses penemuan terfokus disertai dengan ringkasan hasil studi dan laporan penelitian yang diterbitkan meliputi; (a) Langkah pengumpulan data dilakukan secara detail dan mendalam selama mengidentifikasi struktur filosofis dari topik lokasi; (b)

Mengumpulkan data dan meninjau data bersama; (c) menulis hasil studi.

Keempat, yang akan dilakukan (*pear debriefing*) ini adalah dengan melibatkan seseorang untuk membahas temuan serta prosedur analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan ini peneliti harus menempatkan penyingkap sebagai kolaborator untuk percakapan di samping saran harian selama proses belajar. Disamping itu, peneliti telah melaksanakan acara dialog di setiap lokasi pengujian dengan pengawas sekolah, orang tua, dan siswa. Sering membantu untuk mendiskusikan kembali pengamatan dan kesimpulan wawancara yang telah diselesaikan..

Kelima, melakukan laporan tentang hasil atau hasil pengujian untuk memastikan kesesuaiannya dengan para korban dari fenomena yang diselidiki dengan metode pengujian, yaitu setiap wawancara dilakukan dengan meminta sumber untuk mengklarifikasi bahwa catatan data tepat pada akhir wawancara, setiap kesimpulan dari operasi lapangan, ringkasan hasil penelitian. Dan para kritikus adalah mata-mata yang terdiri dari administrator sekolah, orang tua dan siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Allen, K. Eillen. *Maistreaming in Early Childhood Education*. New York: Delmar Publisher Inc, 1980.
- Buchori, Muchtar. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Budimansyah. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Gresindo, 2002.
- Budiyanto. *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Depdiknas, 2005.
- Ciri-Ciri Anak Tuna Netra, http://dapah.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_4795.html, diakses pada tanggal 20 April 2020.
- Cruickshank, William dan G. Orville Jonhson. *Exceptional Children and Youth*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1958.
- Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Darmawan, Hendro dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010.

- Delphi, Bandhi *Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2009.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaan Anak Tunagrahita*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur`an dan Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Depdiknas. *Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003*. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. *Modul Bimbingan Karir Pendidikan Inklusif*. Jakarta: PKLK 2016.
- Direktorat Pembinaan PK-LK. *Pola Pendampingan dan Implementasi Pendidikan Inklusif yang Menyenangkan*. Jakarta: Kemendikbud, 2013.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. *Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dit. PSLB Depdiknas, 2008.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. *Mengenal Pendidikan Terpadu*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2004.

- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2004.
- Efendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Effendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Florian, Leni. *Special or Inclusive Education: Future Trends*. Brititish: Journal of Speciall Education, 2008.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hasan, S. Hamid *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hidayat, et al. *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: UPI Press, 2006.
- Mukhopadhyay, Tito Rajashi. *Pohon Cerdas: Catatan Menakjubkan Seorang Anak Autis*, Terj. Mieke Gembirasari. Bandung: Nuansa, 2007.

Nuridin, Syafruddin dan Basyiruddin Usman. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Rudiyati, Sari. *Potret Sekolah Inklusif di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Umum “Memilih Sekolah yang Tepat bagi Anak Berkebutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) di Hotel INA Garuda Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2011.

Rusman. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Saebani, Beni Ahmad dan Hendra Akhdiyati. *Ilmu Pendidikan Islam 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Safaria, Triantoro. *Autisme Pemahaman Baru untuk Hidup Bermakna bagi Orang Tua*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Schultz. *A History of Mental Retardation*. Baltimore: Paul H. Brookes, 1983.

Smith, J. David. *Sekolah untuk Semua*, terj. Denis. Bandung: Nuansa Cendikia, 2006.

Soemantri, Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

- Soetopo, Hedyat dan Wasty Soemanto. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. *Final Report: World Conference on Special Needs Education: Acces and Quality*. Paris: UNESCO, 1994.
- Wahyudin, Din. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Weley, John & Sons Australia Ltd. *Teaching Inclusive School Communities*. Australia: Jude MacArthur, 2012.
- Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods*. Beverly-Hills: Sage Publication, 1984.
- Yusuf, Munawir dkk. *Pendidikan bagi Anak dengan Problema Belajar*. Solo: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Kilpatrick. *Philosphy of Education from the Experimentalist Outlook*. New York: Harper and Row Boston, 1971.
- Konczal, and Getskow. *Kids With Special Needs Information and Activities to Promote Awareness and Understading*. California: The Learning Work, 1996.
- Lombardi. *Responsible Inclusion of Students with Disabilities*. Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1994.
- Loreman, T. Deppeler, J., and Harvey D. *Inclusive Education:*

- A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom*. NSW: Allen & Unwin, 2005.
- Lozman. *Inclusive School: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom*. Singapore: South Wind Productions, 2005.
- . “Seven Pillars of Support for Inclusive School: Moving from ‘Why?’ To ‘How?’” *International Journal of Whole Schooling* 3, no. 2 (2007): 33.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2007.
- Munandar, Utami. *Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Muslich, Masnur. *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rugaiyah, and Atik Simiati. *Profesi Kependidikan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bandung: Kencana Prenada Media Grop, 2008.
- Sapariadi. *Mengapa Anak Berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Sidiq, Umar. “Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” *Edukasi* 3, no. 2 (2015): 977–90.
- . “Manajemen Modifikasi Kurikulum Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Di Sekolah Dasar National Immersion Primary School Ponorogo).” *Alhayat* 3, no. 2 (2018).
- Sisk, Henry L. *Principles of Management: A System Approach to the Management Process*. England: South-Western Publishing Company, 1999.
- Skjorten, MD. *Towards Inclusion, Education-Special Needs Education An Introduction*. Oslo: Unipub Forlag, 2001.
- Staub, and Peck. *What Are the Out Come for Nondisable Students?* Boston: Educational Leadership, 1994.

- Stubbs, Sue. *Pendidikan Inklusif Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber, Terj. Susi Septaviana*. Bandung: UPI, 2002.
- Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Unesco. *Learning the Treasure Within Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty First Century*. Perancis: Paris, 1998.
- UNESCO. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: Author, 1994.
- Yamin. *Ideologi Kebijakan Pendidikan Menuju Pendidikan Berideologis Dan Berkarakter*. Malang: madani, 2013.
- Zaini, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Teras, 2009.

CURRICULUM VITAE



UMAR SIDIQ, dilahirkan di Madiun, 17 Juni 1976. Pendidikan dasar dan menengahnya di MI Tholabiyah Desa Ngetrep dan MTsN Madiun Filial Teguhan. Kemudian merantau untuk melanjutkan sekolahnya di MAN 1 Tulungagung. Gelar Sarjana Tarbiyah diperoleh pada tahun 2000 dan Magister Pendidikan Islam pada tahun 2005 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada waktu S1 dan S2 inilah dia juga merampungkan Madrasah Diniyah Tingkat Awwaliyah, Wustho dan Ulya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dari tahun 1995-2005. Pemikiran K.H. Asyhari Marzuqi yang merupakan pengasuh pesantren tersebut yang juga alumni Perguruan Tinggi al-A'dham Bagdad, Irak dan Rais Syuriah NU Propinsi DIY inilah yang banyak mewarnai pemikiran penulis sampai saat ini. Gelar Doktor di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diperoleh pada tahun 2017.

Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 2001, menjadi guru Madrasah Diniyah, SMP Tamansiswa Yogyakarta, SMA PIRI 2 Yogyakarta, SMKN 1 Jiwan dan sempat menjadi Kepala Sekolah MI Tholabiyah Ngetrep Jiwan Madiun. Sejak tahun 2008 menjadi dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo sampai sekarang. Di samping itu dia juga aktif mendatangi undangan sebagai penceramah dan pemateri pelatihan metode pembelajaran al-Quran UMMI di berbagai forum dan tempat.

Karya-karya yang pernah dihasilkan dalam bentuk artikel dalam jurnal, dan buku antara lain Larangan Korupsi: Telaah terhadap Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. tentang Suap (Jurnal Dialogia), Urgensi Qashas al-Quran dalam Pembelajaran (Jurnal Cendikia), Urgensi Pendidikan pada Anak Usia Dini (Jurnal Insania), Pro Kontra Poligami dalam Islam: Telaah al-Quran Surat al-Nisa' Ayat 3 (Jurnal Dialogia), Buku Memikat Hati dengan al-Qur'an, Buku Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al- Ahzab 59 (terbit tahun 2016), Buku Etika dan Profesi Keguruan, Buku Manajemen Madrasah (terbit tahun 2018), Buku Studi Hadis, Buku Kepemimpinan Pendidikan, Buku Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun di Ponpes. Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta (terbit tahun 2019), dan lain-lain.